

# ekstensia

Edisi Khusus DAFEP Volume 14 Tahun VIII, Nopember 2001



**DAFEP**

**MEMBANGUN SISTEM PENYULUHAN  
PERTANIAN PARTISIPATIF**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**DEWAN REDAKSI MAJALAH EKSTENSIA EDISI KHUSUS**

- I. Pelindung : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- II Penanggung Jawab : Ir. Moch. Anas Rasyid, M.Ed  
Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian
- III. Pengarah Materi : 1. Ir. M. Ridha Ismail  
2. Ir. Diana Prasastyawati, MSi  
3. Ir. Zahir Zachri, MA
- IV. Tim Penyunting
- Ketua : Ir. Subagyo
- Sekretaris : Ir. Andi Sumarga
- Anggota : 1. Ir. Sri Damayanti, M. Phil  
2. Ir. Sri Puji Rahayu, MM  
3. Ir. Rahman Upe  
4. Ir. Lazarus Ladja  
5. Ir. Nurmuarif, M.Sc  
6. Ir. Medawati, MM  
7. Ir. Wida Lekomaya  
8. Ir. Ichdat Widodo  
9. Ir. Santoso Wibowo, MM  
10. Ir. Syarifuddin Hattab  
11. Ir. Harnida Harun  
12. Bambang Paryono, SH  
13. Ir. Shalimar Andaya  
14. Ir. Abdullah Syarief  
15. Ir. H o t m a n  
16. Drs. Hari Susanto, M.Sc  
17. Ir. Erwin Zulkarnaen  
18. Joko Samiyono, SP
- v. Administrasi/Keuangan : 1. Drs. Rodi  
2. Siti Trimawarni

## *Salam dari redaksi*

Ekstensia Edisi Khusus DAFEP ini diterbitkan dalam rangka sosialisasi Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (*Desentralized Agricultural and Forestry Extension Project/DAFEP*). Tim penyunting Ekstensia dibantu oleh Tim penyunting dari DAFEP mencoba menyajikan kepada para pembaca dengan mengedepankan topik yaitu : "DAFEP Membangun Sistem Penyuluhan Pertanian partisipatif ditengah-tengah maraknya euphoria kebebasan pada awal pelaksanaan Otonomi Daerah. Masih maraknya Euphoria kebebasan, kalau tidak diikuti dengan pemberian informasi yang benar tentang sistem penyuluhan pertanian partisipatif, maka upaya pemerintah memberdayakan petani-nelayan tidak akan dapat tercapai.

Melalui DAFEP, Kabupaten akan diperbaiki dan diperkuat kelembagaan penyuluhan pertanian beserta aparatnya; Diperbaiki kebijaksanaan dan manajemen dibidang penyuluhan pertanian; Serta diintegrasikan program penyuluhan pertanian dan kehutanan untuk memecahkan masalah dan kebutuhan petani dalam mengelola usahataniya. Petani ditingkatkan kemampuannya dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Dengan dukungan kebijakan yang mendukung partisipasi petani, bantuan keahlian, dan pelatihan manajer penyuluhan pertanian, diharapkan akan meningkatkan kemampuan, motivasi dan perbaikan sikap aparat penyuluhan pertanian, serta peningkatan kemampuan berpartisipasi dan kepemimpinan petani dalam penyuluhan pertanian, sehingga akan dibangun sistem penyuluhan pertanian dan kehutanan yang terpadu berorientasi petani dan agribisnis. Dengan demikian petani menjadi mampu merencanakan dan melaksanakan usahatani/agribisnis yang lebih dinamis, produktivitas yang tinggi, berorientasi pasar dan ramah lingkungan. Akhirnya petani dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Peningkatan keberdayaan petani sebagai bagian terbesar masyarakat di Wilayah Kabupaten mestinya menjadi prioritas pembangunan Daerah Kabupaten. Upaya untuk memberdayakan petani antara lain dilakukan melalui penyuluhan pertanian yang partisipatif. Penyuluhan pertanian yang partisipatif akan dapat mengakomodasikan aspirasi petani. Aspirasi petani sebagai bagian terbesar masyarakat Kabupaten menjadi prioritas utama dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Hal tersebut sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Otonomi Daerah itu sendiri. Kemauan politik (*political will*), pemahaman dan penghayatan penyuluhan pertanian partisipatif dari para penentu kebijakan di Kabupaten merupakan kunci utama dalam memberdayakan petani agar petani dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan.

Diharapkan melalui penerbitan Ekstensia Edisi Khusus ini dengan rubrik-rubriknya, semua informasi yang disajikan dapat berguna bagi para pembaca, khususnya para Penyuluh Pertanian, para penentu kebijakan dan penyelenggara pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian, petugas dan aparat terkait lainnya, untuk membantu dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada petani dan masyarakat pada umumnya, sehingga tercapai tujuan pembangunan Daerah dan pembangunan Nasional negeri kita tercinta ini.

Amin. (Sb)

*Selamat Membaca*



KIPPK Kabupaten Maros Tentang Pengaruh Eselonering Muktibin Lambe, Mengapa Harus Menunggu !	3 5
--	--------



Berbincang Bersama Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Kontribusi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Dalam Pembangunan Daerah	7 9
--	--------



Agribisnis Dikembangkan Sesuai Potensi Spesifik Lokalita Memperkuat Penyuluhan Salah Satu Program Dinas Kehutanan	14 17
--	----------



Ngadiman dan DAFEP La Ode Arfah Penyuluh Kehutanan Yang Aktif di DAFEP T. Fiaida	20 25
---	----------



Sekilas Mengenal Wajah Seorang Pionir Wanita Muda dari Indonesia Timur Gabungan Kelompok Wanita "Waru Rite"	29 33
---	----------



BIPP Kulon Progo : Tetap Memberdayakan Petani Walaupun Eselonnya Belum Sesuai Kepedulian Kabupaten Magelang Dalam Memberdayakan Petani :	37
--	----



Memperkuat BIPP Untuk Membangun Sistem Penyuluhan Pertanian Partisipatif Bersama DAFEP BIPPK Bolaang Mongondow Merajut Kembali Kegiatan yang Terserak	46 55
--	----------



Jender Dalam Penyuluhan PRA Langkah Awal Membangun Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan Partisipatif dalam DAFEP	60 65
---	----------



Hasil Kegiatan Misi Supervisi III Bank Dunia Di Kabupaten-Kabupaten Lokasi DAFEP DAFEP Dalam Gambar	73 77
---	----------

**GAPURA** 1

**DAFTAR ISI** 2

**OPINI**

**PROGRAM**

**SOSOK**

**WAHANA**

**WAWASAN**

**GEMA**

## KIPPK KABUPATEN MAROS TENTANG PENGARUH ESELONERING

**P**endapat Ir. Thamrin A.R. Gassing (Kepala KIPPK Kab. Maros) tentang Pengaruh Eselonering Kelembagaan KIPPK

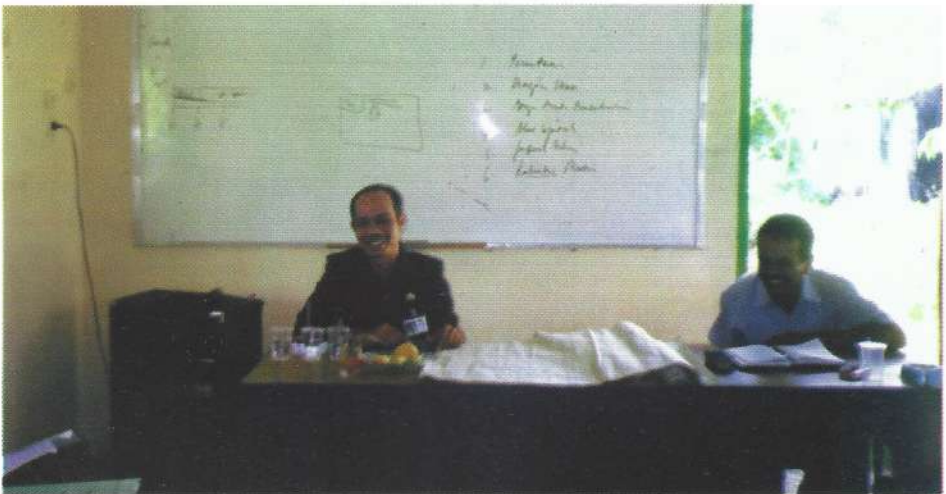
Dengan eselonering KIPPK (Eselon III-a) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maros, tanggal 8 Februari 2000, KIPPK dilengkapi secara struktural dan fungsional. KIPPK sebagai lembaga Struktural jika dibandingkan dengan lembaga fungsional murni sebelum otonomi, kurang memperoleh dukungan dana rutin dan pembangunan. Sekarang setelah menjadi KIPPK memperoleh dana rutin dan dana pem-

angunan sebagai pengganti BPPL/Inpres

Anggaran yang diperoleh sesuai dengan visi dan misi penyuluhan pertanian/kehutanan; artinya pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang jelas serta terfokus;

### KIPPK didukung Program DAFEP

Kegiatan Operasional KIPPK sesuai dengan anggaran yang disusun berdasarkan Renstra (Rencana Strategis), dijadikan sebagai pedoman untuk pendukung pelaksanaan program DAFEP. Renstra mengacu pada model-model yang diselenggarakan



*Ruang kerja yang sederhana*

DAFEP dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan. Renstra selain mengacu pada DAFEP sebagai dasar berpijak, juga ada metodologi P4K yang mengakses kredit. Di Maros sudah terdapat 355 KPK yang telah mencairkan dana lebih 1 milyar rupiah dengan pengembalian kredit yang lancar;

**Manajemen KIPPK Maros**

Dimasa depan ada atau tidak ada DAFEP, KIPPK sebagai lembaga otonomi daerah akan tetap eksis, karena PEMDA menyadari pentingnya penyelenggaraan penyuluhan pertanian/kehutanan dalam

rangka pemberdayaan petani nelayan.

Kelembagaan KIPPK sebagai lembaga pemberdayaan petani-nelayan berupa pendidikan non-formal harus ditangani secara serius dan direspon baik oleh para eksekutif dan legislatif

Ada pemahaman yang sama antara legislatif dan eksekutif tentang pentingnya lembaga penyuluhan pertanian/kehutanan.

Lembaga KIPPK akan efektif dan efisien kalau dilengkapi satu seksi Ketahanan Pangan; Kerjasama dengan IP2TP dan ARM dalam rangka pemberdayaan petani-nelayan dan transfer of technology/teknologi tepat guna akan ditingkatkan. (Sh)



*Salah satu kegiatan KPK*

## MUKTIBIN LAMBE, KTNA BOLAANG MANGONDOW MENGAPA HARUS MENUNGGU?

**A**da pertanyaan seorang fasilitator dua tahun yang lalu, yang masih terngiang hingga saat ini. *Jika sebuah jembatan yang menghubungkan desa kampung halaman anda dengan dunia luar tiba-tiba rusak, apa yang akan anda lakukan?* - Saya terdiam sejenak mendapat pertanyaan yang amat mendadak tersebut, sebab ini kan pelatihan pertanian, tetapi mengapa tanya soal jembatan! Sebelum sempat menjawab fasilitator meneruskan pertanyaan sambil memberikan pilihan jawaban, melihat saya mandeg untuk segera menjawab - *Apa yang akan anda kerjakan? Mendiampkannya? Menunggu yang berwenang datang, misalnya dari Dinas Pekerjaan Umum untuk memperbaikinya? Atau anda punya pikiran lain?* - Tanpa pikir panjang, saya menjawab - *Ya, memang sebaiknya menunggu yang berwenang datang untuk memperbaikinya!*

Fasilitator melihat saya sejenak, rupanya dia masih belum yakin akan jawaban saya, dia meneruskan bertanya - *Mengapa harus menunggu? Mengapa tidak dikerjakan sendiri?* - saya langsung menjawab - *Mengapa harus susah-susah, biarkan saja mereka yang mempunyai tanggung jawab dan kelengkapan sarana dan prasarananya, yang mengerjakan!* - Fasilitator langsung mengejar jawaban saya! - *Apa benar begitu? Apa benar anda dan masyarakat tidak mempunyai kelengkapan sarana dan prasarana untuk memperbaikinya?* - Pikiran saya berkelana memikirkan rentetan pertanyaan itu, saya pikir mungkin ada benarnya juga mengapa tidak dimulai dari diri kita.

Itu sepggal dialog antara saya dengan seorang fasilitator, dalam pelatihan partisipatif. Makna sebenarnya adalah ternyata masyarakat itu sendiri mampu mengambil keputusannya untuk menolong dirinya sendiri dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dihadapinya, tanpa menunggu orang lain untuk menyelesaikannya. Buktinya meskipun hanya dalam *imajinasi*, kami mencoba merumuskan apa, siapa, bagaimana, dimana tentang apa-apa yang diperlukan untuk memperbaiki jembatan yang rusak itu, tentunya dengan kapasitas yang kami punyai, ternyata kami secara bersama-sama mampu merumuskan bagaimana memperbaiki jembatan yang tiba-tiba rusak tersebut.

Setidaknya mirip seperti itulah buah pikiran Muktibin Lambe, kontaktani dari Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Pada kapasitasnya sebagai seorang Kontaktani, yang menurutnya adalah seorang pemimpin dari kelompoknya, seorang yang dipercaya untuk mewakili komunitasnya, seorang yang memahami aspirasi dari anggota kelompoknya. Seharusnya tidak lagi menjadi seorang yang selalu menunggu dan menunggu, tetapi menjadi sumber inspirasi menghadapi kemacetan berpikir dan menjadi energi penggerak bagi kemajuan kelompok dan masyarakat sekitarnya.

Pada kapasitas seperti ini, maka peranan kontaktani sangatlah menentukan sehingga dapat dikatakan kemajuan suatu kelompok adalah juga sangat ditentukan oleh kualitas kontaktani yang ada di wilayahnya. Sebagai pemimpin, Bangsa China mengibaratkan

seorang pemimpin seperti seekor Naga. Seekor naga adalah makhluk perkasa yang tidak hanya dapat muncul dari dasar laut, tetapi juga dapat terbang menguasai angkasa raya. Dasar laut melambangkan lapisan bawah yang mewakili rakyat jelata, sedang angkasa raya adalah lapisan atas yang menaungi jagat semesta. Jadi seorang pemimpin menurut mitos bangsa China adalah mereka yang bisa mewakili aspirasi masyarakat bawah dan mempunyai kekuatan untuk melindunginya.

Dalam konteks ini, Muktibin Lambe mengungkapkan pengalamannya ketika peran dan kiprahnya sebagai seorang kontaktani dituntut untuk bermain dalam program/proyek DAFEP dalam pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek agar supaya memperoleh informasi mengenai kondisi lokal. Di sinilah peran KTNA tampil sebagai unsur dari masyarakat menurutnya sebuah kegiatan asing yang akan masuk ke dalam komunitas, harus melalui sistem sosial yang dipercaya oleh masyarakat itu. Dan itu tidak lain adalah kontaktani.

Lebih lanjut menurutnya pendekatan pembangunan harus mulai dengan orang-orang yang paling mengetahui tentang sistem kehidupan mereka sendiri. Pendekatan ini harus menilai dan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan mereka sendiri, dan memberikan sarana yang perlu bagi mereka supaya dapat mengembangkan diri. Untuk itulah dia sangat setuju dengan program di wilayahnya yang mengembangkan gagasan Penyuluh Swakarsa dengan bingkai KTNA dan ditumbuhkannya Klinik Konsultasi Pelayanan Agribisnis (KKPA) sebagai bentuk pengembangan kelem-

bagaan yang memberikan sarana yang diperlukan oleh masyarakat.

Disini masyarakat setempat dilibatkan dalam pemilihan, perancangan, perencanaan dan pelaksanaan program atau proyek yang akan mewarnai hidup mereka. Sehingga dengan demikian dapatlah dijamin bahwa persepsi setempat, pola sikap dan pola berpikir serta nilai-nilai dan pengetahuannya ikut dipertimbangkan secara penuh. Yang pada hakikatnya merupakan bagian tak terlepas dari kegiatan pembangunan sebagai umpan balik (*feedback*).

Proyek menurutnya harus didasarkan atas permintaan setempat. Karena itu dia sangat menyukai pendekatan 'PRA' menurutnya pendekatan ini didorong oleh permintaan. Sehingga kegiatan proyek berfokus lebih kepada menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat setempat, bukan kebutuhan yang dirancang dan disuarakan oleh orang luar. Masalahnya bagaimana masyarakat setempat dapat memberi perhatian terhadap sesuatu yang baru dan berbeda, apabila sebelumnya mereka tidak mengetahui apapun mengenai apa yang akan terjadi. Metode yang dipakai adalah motivasi bukan 'menjual atau mendorong', dan permintaan untuk bantuan serta lebih banyak informasi jelas diperlukan.

Sebagai sebuah tujuan, PRA menghasilkan pemberdayaan, yakni setiap orang berhak menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupannya, dengan demikian PRA adalah alat dalam (misalnya) memajukan persamaan dan demokrasi. Inilah barangkali, saatnya kita tidak harus selalu menunggu, tetapi pada hakekatnya kita mempunyai kemampuan untuk secara mandiri menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi! (Aa)

# Berbincang Bersama Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan

DR. IR. Aep Ruhandi, M.Ed.

**B**erbincang dengan seorang pimpinan suatu lembaga atau instansi semacam Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan untuk sebuah topik “DAFEP” atau *Dezentralisation Agricultural and Forestry Extension Project* seharusnya adalah sesuatu yang biasa, namun perbincangan kali ini menjadi luar biasa karena pimpinan kali ini adalah pimpinan yang ke



Dr. Ir. Aep Ruhandi, M.Ed.

7 semenjak Bapak Ir. Tohadi, sebagai Pejabat Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan yang mengawali/merintis proyek DAFEP bersama Pusat Penyuluhan Pertanian yang relatif masa kepemimpinannya lebih lama.

Perbincangan kali ini juga lebih menarik karena beliau adalah salah satu tokoh dari sedikit tokoh PUSAT BINA PENYULUHAN KEHUTANAN (nama sekarang) yang *sangat concern dan committed* di dalam menangani proyek bersama antara Departemen Kehutanan dengan saudara tuanya Departemen Pertanian, yaitu Proyek DAFEP atau yang dalam bahasa Indonesianya dipahami sebagai Proyek Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten.

Sebagai ‘*orang baru*’ beliau tidak asing lagi dengan komunitas saudara tuanya,

karena ternyata beliau adalah sama-sama satu alumni pada saat beliau menuntut ilmu S2 nya M.Ed. di *Unitate State of America* bersama Bapak Ir. Moch Anas Rasyid, M.Ed. yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Dengan kata lain secara sosiologis di dalam proyek DAFEP ini beliau merasa “*di rumah sendiri*”, oleh karenanya tidak perlu

diragukan lagi *sense of belongingnya* untuk mensukseskan Proyek ini.

Sebagai langkah awal yang cukup strategis, beliau memimpin sendiri acara Pertemuan pre-Wrap-up Meeting hasil supervisi tengah tahun pada tanggal 21 Agustus 2001 oleh Team World Bank yang diselenggarakan di Departemen Pertanian. Sebelumnya beliau sendiri juga ikut mendampingi Tim Supervisi World Bank ke Propinsi NTB. Kemudian ditindak lanjuti dengan Pertemuan bersama dengan pihak Bappenas pada tanggal 24 Agustus 2001 yang baru lalu.

Kegiatan sebelumnya adalah sosialisasi proyek dihadapan para Eselon 1 Lingkup Departemen Kehutanan yang diselenggarakan pada pertengahan bulan Juli 2001, di mana pada masa-masa kepemimpinan

sebelumnya belum pernah diadakan, sehingga pemahaman DAFEP di lingkup Departemen Kehutanan menjadi lebih focus. Ini terbukti dari perhatian yang diberikan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro KLN dan Investasi yang senantiasa melakukan monitoring akan progres dari proyek ini dan yang tak kalah pen-

tingnya adalah perhatian dari Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan sehubungan dengan adanya perkembangan baru Kelembagaan Penyelenggara Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Rintisan dan Mitra DAFEP yang telah terintegrasi menjadi satu sebagai penjelmaan dari Balai Informasi Penyuluhan Pertanian (BIPP). Bahkan pada tanggal 23 Oktober 2001 ini Bapak Sekretaris Jenderal berkenan untuk melakukan kunjungan kerja ke DI Yogyakarta untuk melihat dari dekat Proyek DAFEP di Propinsi tersebut.

Pendek kata bila selama ini, substansi kehutanan didalam Proyek ini tidak begitu menonjol atau kurang perhatian itu memang benar adanya, hal ini bukan hanya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di Departemen Pertanian melainkan sangat dirasakan oleh kami yang berada di Departemen Kehutanan. Namun kami yakin ke depan layar telah dikembangkan, tinggal kemana kemudi akan selalu diarahkan,



DAFEP mempertemukan PPL dan PKL di lapangan

Integrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan di Daerah adalah suatu keharusan di era Otonomi Daerah untuk efektifitas dan efisiensi penyelenggaraannya, sebagaimana salah satu butir rumusan dalam Rapat Regional Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Se Sumatera Bagian Selatan yang diselenggarakan di Bandar Lampung, tanggal 1-3 Oktober 2001 yang baru lalu, yaitu "untuk mendorong efektifnya penyelenggaraan penyuluhan di daerah, perlu adanya colaborasi manajemen dalam *satu wadah tenaga penyuluh serumpun* (PPL-PKL) seperti yang diisyaratkan dalam SK. Mendagri No. 50 Tahun 2000, di mana BIPP dimungkinkan dikembangkan menjadi Balai/Badan/Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga segala peraturan administrasi kepegawaiannya diberlakukan sama (Nm)

## Kontribusi Penyuluh Pertanian dan Kehutanan Dalam Pembangunan Daerah

Tuntutan otonomi daerah, dikaitkan dengan pembangunan nasional yang memfokuskan pembangunan daerah sesuai dengan yang diamanatkan GBHN 1999 - 2004 berupa Program Pembangunan Lima Tahun atau tepatnya disebut PROPENAS.

Pembangunan daerah seperti diamanatkan GBHN, yaitu mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka memberdayakan masyarakat, terutama petani nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan sistem agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam.

Pemberdayaan petani-nelayan untuk mempercepat pembangunan pedesaan dilakukan melalui pembangunan pertanian, kemudian timbul masalah karena pembangunan pertanian masa depan dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pergeseran nilai, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan strategis, baik dalam maupun luar negeri.

Tantangan yang lebih mendasar, yaitu pemenuhan kebutuhan pangan, persaingan pasar global, rendahnya tingkat pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan, penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas angkatan kerja pertanian dan kehutanan, optimasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Untuk mengantisipasi tantangan



*Ir. Moch. Anas Rasyid MEd  
Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertama*

tersebut diatas, tentu diperlukan reorientasi paradigma dan program pembangunan pertanian yang difokuskan pada pemberdayaan dan kemandirian petani-nelayan melalui pembangunan sistem agribisnis yang berdaya saing dan sesuai dengan keunggulan komparatif masing-masing daerah serta pembangunan Bimas Ketahanan Pangan.

Pembangunan Sistem Agribisnis dan Bimas Ketahanan Pangan baru dapat

dioptimalkan, jika pengembangan sumber daya manusia pertanian menjadi unsur utama dan strategis dalam menghadapi berbagai perubahan dan permasalahan yang semakin kompleks di masa datang.

Pengembangan sumber daya manusia pertanian dalam arti luas, termasuk pengembangan penyuluhan pertanian dan kehutanan memiliki kedudukan yang strategis dalam upaya pengembangan sistem agribisnis dan bimas ketahanan pangan di pedesaan.

Hal tersebut dikaitkan dengan mandat dan ruang lingkup penyuluhan pertanian yang sejalan dengan pengembangan sistem agribisnis dan bimas ketahanan pangan tersebut.

Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di daerah sangat tergantung dari sumber daya penyuluhan pertanian dan kehutanan yang ada, khususnya **kemampuan para penyuluh pertanian dan kehutanan.**

Bagaimana dan apa kontribusi pertanian dan kehutanan dalam pembangunan daerah?

Berikut ini disampaikan hasil wawancara penyunting majalah Ekstensia dengan Bapak Ir. Moch. Anas Rasyid, M.Ed., Kepala Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Departemen Pertanian sebagai berikut :

1. Seperti diketahui bahwa penyuluhan pertanian adalah bagian dari sistem pembangunan pertanian, bagaimana menurut Bapak?

\* Mandat penyuluhan pertanian adalah menyelenggarakan “pendidikan luar sekolah” (non formal) bagi petani-nelayan beserta keluarganya, agar dinamika dan kemampuannya dalam mengembangkan kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peran dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian. Oleh karena itu penyuluhan pertanian adalah bagian dari sistem pembangunan pertanian artinya bagaimana kita mengupayakan membangun kemampuan masyarakat pada umumnya, petani-nelayan pada khususnya yang dilakukan melalui proses belajar-mengajar dan penyediaan jasa pendidikan penyuluhan pertanian itu.

2. Dikaitkan dengan mandat penyuluhan pertanian di atas, sebenarnya apa yang menjadi tujuan utama dari penyuluhan pertanian?

\* Menurut hemat saya, tujuan utama penyuluhan pertanian adalah suatu upaya untuk membantu dan atau memfasilitasi petani-nelayan, agar mampu menolong dirinya sendiri dalam mengelola usaha taninya menjadi lebih baik dan menguntungkan yaitu dari better farming menjadi better business, better living, better community dan pada akhirnya menjadi better environment sekaligus meningkatkan produk-

tivitas, pendapatan dan kesejahteraanannya.

3. Kita sadar bahwa penyuluhan pertanian begitu pentingnya dikaitkan dengan pembangunan daerah, tetapi konon kabarnya jumlah dan kualitas penyuluh pertanian pada 3 (tiga) tahun terakhir banyak mengalami perubahan, bagaimana Bapak berupaya mengantisipasi hal tersebut, terutama setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah diberlakukan sejak 1 Januari 2001?

\* Keberhasilan penyelenggaraan penyuluhan pertanian dikaitkan dengan pembangunan daerah, khususnya pembangunan pertanian memang mengalami dilematis setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan dilihat dari aspek jumlah dan kualitas penyuluh pertanian dalam melakukan bimbingan dan fasilitasi kepada petani-nelayan, beserta keluarganya. Semula jumlah penyuluh pertanian 33.327 orang yang sebagian besar bertugas di wilayah binaan BPP sebanyak 33.492 orang (81,93%), sisanya bertugas di kabupaten, propinsi dan pusat. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 berlaku, lebih kurang 1400 orang penyuluh pertanian beralih jabatan ke struktural, sedang masalah kemampuan penyuluh pertanian dan kehutanan didasari pada profesionalismenya.

4. Bagaimana mengembangkan profesionalisme penyuluh pertanian dan kehutanan tersebut?

\* Pengembangan profesionalisme penyuluh pertanian dan kehutanan telah diupayakan melalui suatu kelembagaan fungsional penyuluhan pertanian dan kehutanan. Semula jumlah BIPP 334 buah tersebar di seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. Setelah UU Nomor 22 Tahun 1999 diberlakukan, menurut data sementara 77 buah tetap sebagai BIPP, 4 buah menjadi Badan Informasi dan Penyuluhan Pertanian, 57 buah menjadi Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan kehutanan, 53 buah bergabung dalam Sub Dinas Penyuluhan Pertanian, 15 buah bergabung dalam Seksi Penyuluhan Pertanian, 19 buah dibubarkan dan tidak jelas statusnya serta sisanya belum ada informasi tentang statusnya.

5. Dalam era otonomi daerah pada prinsipnya peran pemerintah kabupaten/kota sangat penting dalam tingkatan profesionalisme penyuluh pertanian dan kehutanan, bagaimana hal tersebut dapat diwujudkan?

\* Dilihat dari kronologis pembangunan daerah, yang menempatkan pembangunan pertanian menjadi penggerak ekonomi rakyat di pedesaan sesuai dengan GBHN, seharusnya pemerintah kabupaten/kota menempatkan sumber daya penyuluhan pertanian pada umumnya, dan peningkatan profesionalisme penyuluhan pertanian

dan kehutanan menjadi bagian integral dari pembangunan daerah karena penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian.

Sejalan dengan itu, maka kontribusi penyuluh pertanian dan kehutanan dalam pembangunan daerah baru dapat diwujudkan melalui penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan kehutanan dalam rangka memberdayakan masyarakat, terutama petani-nelayan itu.

6. Apa yang dimaksud Konsep Penyuluhan Pertanian Era Otonomi Daerah?

\* Konsep penyuluhan pertama pada era otonomi daerah adalah melaksanakan otonomi di bidang penyuluhan pertanian. Pelaksanaannya tidak hanya sekedar menyerahkan kewenangan penyuluh pertanian kepada daerah, tetapi yang lebih penting adalah :

- Bagaimana membangun otonomi pada masyarakat khususnya petani-nelayan, agar dapat berperan serta pada pembangunan daerah;
- Bagaimana meningkatkan keberdayaan petani-nelayan; dan
- Bagaimana meningkatkan produksi produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan di wilayah kabupaten/kota.

7. Dengan demikian, penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah bagaimana membangun otonomi petani-nelayan?

\* Membangun otonomi petani-nelayan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian era otonomi daerah, yaitu :

- a. Dilakukan berdasarkan kreativitas/prakarsa atau aspirasi masyarakat pada umumnya, khususnya petani-nelayan untuk dapat menyusun rencana dan melaksanakan sendiri usahatani-nya.
- b. Meningkatkan peran dan peran serta masyarakat pada umumnya, khususnya petani-nelayan dalam pembangunan pertanian yang bertujuan untuk kepentingannya.
- c. Membantu petani-nelayan dalam memutuskan sendiri secara benar dalam mengelola usahanya, sehingga menjadi efisien dan efektif sesuai dengan keinginannya.
- d. Memberdayakan masyarakat pada umumnya, khususnya petani-nelayan agar dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan kesejahteraannya.

8. Apa saja bentuk-bentuk kontribusi penyuluh pertanian dan kehutanan pada pembangunan daerah?

\* Kontribusi penyuluh pertanian dan

kehutanan pada pembangunan daerah dilakukan melalui penyelenggaraan penyuluh pertanian dan kehutanan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan kabupaten/kota antara lain :

- a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan bimbingan dan fasilitas yang bersifat teknis operasional yang langsung berhubungan dengan masyarakat pada umumnya, khususnya petani-nelayan untuk dapat mengembangkan usahataniya sehingga dapat meningkatkan produksi, produktivitas, pendapat dan kesejahteraan.
- b. Melaksanakan kegiatan pelayanan jasa pendidikan dan informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya petani-nelayan beserta keluarganya untuk meningkatkan produksi, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan.
- c. Melaksanakan bimbingan dan fasilitas serta mendorong dan memotivasi, agar para petani-nelayan dapat mengembangkan usaha pertanian menjadi skala ekonomi yang efisien dan efektif dengan membentuk badan usaha yang memerlukan ujin usaha.
- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian sesuai missinya, yaitu memberdayakan petani-nelayan yang dilakukan secara

- terintegrasi tidak tumpang tindih dengan unit kerja lainnya berdasarkan tugas pelaksanaan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan satu-satunya di kabupaten/kota.
- e. Melaksanakan kegiatan yang menghasilkan informasi/teknologi spesifik lokasi dan jasa pendidikan yang diperlukan daerah/dinas lingkup pertanian dan kehutanan untuk kepentingan petani-nelayan dan keluarganya.
  - f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan di bidang profesionalisme penyuluh pertanian dan kehutanan yang dapat meningkatkan produksi, produktivitas, pendapatan dan kesejahteraan petani-nelayan.

Dan masih banyak lagi bentuk kontribusi penyuluh pertanian dan kehutanan pada pembangunan daerah yang secara tidak langsung dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) karena masyarakatnya pada umumnya dan khususnya petani-nelayan menjadi meningkat pendapatan dan kesejahteraannya, sehingga tidak benar kalau dikatakan institusi/kelembagaan penyuluhan pertanian dan kehutanan dengan sumber daya penyuluhannya tidak diperlukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (Sh.)

## Agribisnis Dikembangkan Sesuai Potensi Spesifik Lokalita



*Ir. John Hugo Silalahi  
Bupati Simalungun*

**D**i Kabupaten Simalungun, membangun pertanian, perkebunan, kehutanan dan pariwisata menjadi prioritas perhatian Pemda saat ini, kendati tentu tidak meninggalkan pembangunan aspek lain. Demikian awal catatan Extensia pada medio September 2001 menyimak penjelasan Bupati Simalungun di ruang kerjanya di Pemantang Siantar. Sebagai kota sejuk ini memang “kaya” akan potensi sumber daya alam pertanian yang dikelilingi oleh hamparan luas. Keberadaan wilayah perkebunan besar telah menyimpan berbagai riwayat dan kiat-kiat ataupun konsep pemanfaatannya; Seperti “doeloe” ada perkebunan milik Belanda bernama HVA, ada perkebunan

milik Inggris “Good Year Komoditi” yang mengusahakan teh, kelapa sawit dan karet. Dengan demikian, selain sumberdaya berbasis agribisnis mencukupi, Simalungun paling tidak juga memiliki pengalaman pengembangan agribisnis sarana produksi pembibitan / perbenihan, modal sosial dan teknologi walau belum meluas. Sub sektor pertanian primer (on farm agribusiness) telah menghasilkan beberapa jenis komoditi pertanian primer unggulan; Antara lain di beberapa wilayah sentra pertanian Simalungun bagian bawah (hilir) telah berhasil dipertahankan sebagai daerah lumbung sekaligus pemasok beras ke kabupaten lainnya. Selain itu terus diupayakan peningkatan pembudidayaan tanaman pinang, jati dan melinjo. Sedangkan wilayah Simalungun bagian atas (hulu) dirintis tumbuhnya beberapa sentra kawasan pengembangan produksi pertanian dan hortikultura seperti jagung (primadona), sayuran, wortel, kol, kentang, tomat, cabe, dan “Jeruk Raya” terkenal asal kecamatan Raya serta pembudidayaan kopi (sebelah Barat) dan kemiri. Terwujudnya Ketahanan Pangan di Simalungun selama ini tidak terlepas dari kondisi potensi sumber daya, terutama bahwa sebagian besar jenis tanaman tersebut diatas memang cocok dan dapat dibudidayakan pada segala musim. Oleh karena itu tidak berlebihanlah kiranya apabila dikatakan bahwa Sima-

lungun senantiasa telah dan akan mampu bebas dari “**krisis**”, apakah itu krisis pangan ataupun krisis moneter.

**AGRIBISNIS HILIR ADALAH TANTANGAN**

Kedepan ini, pertanian, perkebunan dan kehutanan di Simalungun akan terus dikembangkan. Diperlukan tumbuhnya kegiatan ekonomis yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi produk-produk olahan, baik berupa produk antara maupun produk akhir beserta kegiatan pemasarannya. Sub sektor agribisnis hilir (down stream agribusiness) ini harus tumbuh berbasis **ekonomi kerakyatan dan bertumpu pada keperluan-kemampuan SDM petani** serta dikembangkan sesuai kondisi potensi spesifik lokalita. Upaya peningkatan

nilai tambah atas komoditas unggulan yang ada tersebut, seperti produk hortikultura di Simalungun atas (hulu) tidak lain diarahkan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani setempat.

Arah pengembangan pertanian tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Kabupaten Simalungun yang mandiri, sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan institusi yang prima pada 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan Misi Pembangunan, adalah : (1) Meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan melalui diversifikasi, intensifikasi dan rehabilitasi, serta menggali dan memantapkan obyek-obyek wisata, (2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang pertanian, pariwisata dan perkebunan, (3) Meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat di



*Potensi sumber daya alam yang menjanjikan*

- kabupaten Simalungun, (4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana,
- (5) Meningkatkan kualitas pendidikan,
- (6) Meningkatkan kualitas kesehatan,
- (7) Meningkatkan ketahanan pangan,
- (8) Meningkatkan keamanan.

### **PENYULUHAN PERTANIAN YANG BERHASIL GUNA**

Dalam upaya pengembangan pertanian agribisnis di kabupaten Simalungun, *penyuluhan pertanian* harus mengaktifkan kegiatannya agar menghasilkan dan menyediakan jasa yang sesuai kebutuhan. Oleh karena itu segenap aparat penyuluh pertanian dan kehutanan pada Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIPPK) dengan fasilitas yang disediakan, dapat segera melaksanakan tugas sesuai peran dan fungsinya secara lebih profesional. Penyuluh tidak hanya menyuluh (memberi penjelasan) atau melatih petani, akan tetapi harus mampu menciptakan sekaligus melaksanakan sistem penyuluhan yang efektif memberdayakan petani, mengembangkan agribisnis dan agroindustri sesuai potensi sumberdaya lokal. Disamping itu Komisi Penyuluhan Pertanian yang telah dibentuk dapat digunakan sebagai media koordinasi yang baik antar Instansi/pihak terkait. Dengan demikian Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (PPP/DAFFEP) yang implementasinya di Simalungun yang telah tersosialisasi dalam tahun terakhir ini, diharapkan segera berdampak nyata bagi terwujudnya pengembangan agribisnis

Meningkatkan kemampuan petani dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian berorientasi agribisnis menuntut kesiapan dan kemampuan penyuluh dan seluruh pejabat/pembina pertanian & kehutanan mencermati permasalahan dan kebutuhan petani serta potensi spesifik yang ada. Membantu petani mengatasi permasalahan dalam upayanya mengakses teknologi dan pasar juga menjadi "PR" serius bagi penyuluh pertanian/kehutanan. Dengan demikian tugas "**keinformasian**" bagi Penyuluh Pertanian KIPPK Kabupaten Simalungun akan mencakup pula hal-hal yang berkaitan dengan ketrampilan mengemas dan pengapresiasi data informasi pasar, potensi berbagai komoditas unggulan spesifik, promosi dan kemudahan informasi untuk merangsang agribisnis di tingkat petani, termasuk inovasi agribisnis, baik teknologi lokal maupun teknologi baru dari berbagai sumber yang memang dibutuhkan petani. Dalam kaitan memperkuat tugas itu, maka dukungan ketrampilan dan fasilitas/sarana dari Proyek DAFEP perlu digunakan semaksimal oleh para penyuluh dan para petani.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Petani merupakan upaya penting dari Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Simalungun. Potensi yang telah ada selama ini seperti, motivasi, rasa tanggung jawab, kesadaran, inisiatif, kreativitas, dan keberanian mengemukakan pendapat; perlu terus dikembangkan, diakomodasikan dan dimobilisasikan sehingga petani mampu mandiri dalam membangun pertanian. (Sw)



*Ir. Mukmir Damanik  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Simalungun*

## Memperkuat Penyuluhan Salah Satu Program Dinas Kehutanan

Potensi sumberdaya alam hutan di kabupaten Simalungun dengan luas 104.661 Ha tidak semata hanya mengurus kayu saja, akan tetapi perlu diupayakan adalah suatu sistem pengelolaan yang berazaskan manfaat dan lestari untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Hutan Lindung tercatat seluas 46,348 ha, Kawasan Suaka Alam 168 ha, Hutan Produktif Tetap 19,369 ha, Hutan Produktif Terbatas 38.776,70 ha.

Mempertahankan keberadaan hutan lestari memerlukan kesungguhan segenap SDM kehutanan yang memiliki kemampuan, berakhlak, arif bijaksana, bertanggungjawab dan profesional. Di sisi lain keberadaan potensi SDM kehutanan di Kabupaten Simalungun, baik yang terdaftar bertugas pada Instansi Birokrasi khususnya Dinas Kehutanan kabupaten Simalungun, maupun masyarakat di kawasan hutan setempat dan masyarakat swasta yang

berusaha dalam bidang pemanfaat hasil hutan, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pengelolaan sumberdaya alam hutan.

Oleh karena itu, Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun adalah Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan hasil hutan melalui upaya yang melandaskan pada prinsip pengelolaan sumberdaya alam hutan secara lestari dengan menumbuhkan sikap masyarakat yang ramah terhadap lingkungan alam hutan.

Kedepan ini, Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun mengupayakan terealisirnya kegiatan prioritas yaitu :

- (1) Pengusahaan hutan produktif melalui pengkonservasian lahan hutan secara illegal
- (2) Perlindungan dan konservasi tanah dengan pengembangan wisata hutan
- (3) Rehabilitasi lahan perhutanan sosial dengan sasaran kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Rehabilitasi lahan krisis



*Kepala KIPPK Kab. Simalungun "Peningkatan Kemampuan aparat penyuluhan adalah penting"!*

- (4) Inventarisasi dan tataguna hutan dengan sasaran penataan batas hutan dan Rekonstruksi tata batas serta Pengukuran kawasan hutan
- (5) Penyuluhan kehutanan dengan meningkatkan motivasi masyarakat untuk berperan serta aktif dalam perlindungan kelestarian hutan.

### **Penyuluh Kehutanan dan Penyuluh Pertanian berkantor di KIPPK**

Menyadari pentingnya tugas dan fungsi penyuluhan terutama untuk mewujudkan tercapainya Misi Dinas Kehutanan Kabupaten dan sasaran prioritas program sebagaimana tersebut diatas, maka saat ini sedang diproses keputusan pelimpahan pengelolaan sebanyak 79 orang Penyuluh

Kehutanan ke Kantor Informasi dan Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (KIPPK) Kabupaten Simalungun. Walaupun demikian, selama beberapa bulan terakhir ini para penyuluh pertanian dan kehutanan telah bekerja bersama memfungsikan KIPPK terutama didalam merealisasikan berbagai kegiatan Proyek Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (PPP/DAFEP).

Tantangan tugas mendesak bagi para Penyuluh di KIPPK Kabupaten Simalungun adalah pemberdayaan kelompok tani yang terkonsentrasi pada sasaran konservasi lahan kritis di 7 Kecamatan daerah gunung tangkapan air dan 12 Kecamatan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Hingga tahun 2003 nanti, petani diharapkan meningkat kemampuannya dalam pelaksanaan penyuluhan. Oleh

karena itu serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan di tingkat petani secara partisipatif antara petugas penyuluhan dan petani diharapkan merupakan pembekalan efektif bagi mereka, seperti : Identifikasi keadaan kelompok tani, analisa kebutuhan latihan bagi petani, Pemahaman Pedesaan secara singkat (PRA), Pelatihan bagi Ketua Kelompok Tani dalam perencanaan Pelatihan PRA dan pemberdayaan wanita.

### **Aparat Penyuluh Pertanian dan Kehutanan bekerja Profesional**

Di samping Home base, kerjanya Penyuluh telah terakomodasi kedalam satu kantor KIPPK Kabupaten Simalungun, Pemerintah Daerah juga telah memberi kemudahan bahwa kegiatan operasional

penyuluhan pertanian dan kehutanan menjadi kegiatan rutin (Anggaran Rutin Kabupaten Simalungun) bukan lagi kegiatan proyek (Anggaran Pembangunan). Kegiatan Penyuluh yang demikian, diharapkan dapat menghasilkan kinerja sesuai kebutuhan di lapangan. Sejalan dengan itu, melalui berbagai kegiatan yang didukung Proyek DAFEP, seperti Pelatihan Metode Penyuluhan Pertanian Partisipatif, Pelatihan Perencanaan Penyuluhan Partisipatif, Lokakarya Penyusunan Perencanaan Media Strategis, Lokakarya Penyusunan Media Informasi, dll merupakan peluang bagi pengembangan kapasitas para penyuluh sebagai asset potensi SDM, khususnya upaya peningkatan SDM Kehutanan, yang merupakan salah satu Program Dinas Kehutanan kabupaten Simalungun (Sw).



*P. Mesdi, Penyuluh Marihat Badar Kec. Memotivasi perubahan sikap petani itu penting*

## ”NGADIMAN dan DAFEP”

**A**da yang tidak berubah pada Ngadiman, begitu panggilan akrabnya sejak saya lihat 7 tujuh tahun yang lalu yaitu badannya yang tambun dengan wajahnya yang berjambang lebar dengan gaya bicara yang keras dan ceplas-ceplos. Nah ..... barangkali, justeru disinilah menariknya sosok Ngadiman bak seorang jawara ..... dan ternyata ia memang seorang jawara dibi-dangnya yaitu pertanian.

Ngadiman kini menjadi salah satu tokoh masyarakat di lingkungannya, menjadi guru bagi rekan dan bahkan dosen bagi para kader militan yang berjumlah kurang lebih 300 orang yang tersebar di 4 Propinsi di Sumatera yaitu Sumatera Utara, Aceh, Riau dan Sumatera Barat dan belum lengkap pula kalau Ngadiman belum disebut sebagai “*Bapak*” bagi anggotanya yaitu Kelompok-tani Jaya karena dialah yang telah berhasil mengantar kelompoknya untuk meraih berbagai macam prestasi seperti : **Pemenang I** masing-masing pada lomba Pola Tanam Tingkat Kabupaten Simalungun Tahun 1990/1991, Lomba Peternakan Sapi Potong Tingkat Kabupaten Simalungun Tahun 1991/1992, Lomba Insus Pola Tanam Tingkat Propinsi

Sumatera Utara pada Tahun 1992/1993, Lomba Kelompoktani Berprestasi Tingkat Propinsi Sumatera Utara Tahun 1993/1994 dan **Pemenang Harapan I** Lomba Insus Pola Tanaman Tingkat Nasional Tahun 1993/1994.

Karena keberhasilannya pula, pria



*Ngadiman dengan mitra kerjanya*

kelahiran Kabupaten Bangkalan-Propinsi Jawa Timur yang beristrikan Rosimal Damanik, wanita kelahiran Desa Tanjung Hataran, Kecamatan Pematang Bandar ini, memberanikan diri mendirikan Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S) yang berlokasi di Desa kelahiran istrinya. Ia berpendapat bahwa meskipun dia telah merasakan keberhasilannya, namun masih dirasa perlu menukarkan dan menyebarkan apa yang dia peroleh selama ini kepada orang lain agar orang lain

pun menjadi seperti dirinya.

Ia percaya bahwa P4S yang didirikan itu bermanfaat bagi orang lain terutama bagi masyarakat sekitar dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta keterampilan dibidang pertanian yang secara tidak langsung menunjang program Pemerintah dalam Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan melestarikan Program Propinsi Sumatera Utara yang biasa disebut dengan istilah "Marsiputure Hutana Be".

Pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional, menuntut adanya perubahan yang terus-menerus dalam aspek teknologi, sosial budaya dan ekonomi yang dalam pelaksanaannya melibatkan banyak pihak seperti Pemerintah, Swasta dan masyarakat.

Kecepatan proses perubahan perilaku para petani selaku pelaksana utama pembangunan pertanian sangat menentukan terwujudnya masyarakat pertanian yang maju dan tangguh yang mampu bersaing dipasar dunia.

Kita patut bersyukur, dengan keteladanan, kepionieran, kepedulian dan partisipasi Ngadiman yang saat ini telah mampu menjadi "Mitra Kerja Pemerintah" dalam mempercepat pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pendidikan

dan pelatihan, dapat mencerdaskan dan mensejahterakan petani di pedesaan dalam melaksanakan gerakan pembangunan Desa terpadu.

P4S Tani Jaya, demikian nama P4S yang didirikan Ngadiman 7 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Maret 1994 dengan SK Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Sumatera Utara Nomor : LDL/0329.706/1994; telah mampu bekerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta seperti UNILA (Lampung), USI (Simalungun) dan UISU (Universitas Islam Sumatera Utara).

Disela-sela kesibukannya sebagai Direktur Badan Usaha yang mayoritas sahamnya dimilikinya, serta sebagai pengurus berbagai organisasi seperti menjadi Bendahara Kelompok KTNA Nasional, Ketua Kelompok KTNA Tingkat Kabupaten, ternyata Ngadiman masih mampu menjadi pembina dalam "Pendidikan Sistem Ganda" salah satu metoda pendidikan yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Menengah Kejuruan, Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani kegiatan-kegiatan seperti magang dan pelatihan-pelatihan teknis lainnya.

"Menyenangi bidang Penyuluhan Pertanian



*Ngadiman dengan keluarga*

karena lingkungan” Ngadiman kecil pindah ke Sumatera sejak tahun 1962, ketika ia masih duduk di sekolah dasar. Ia mengikuti ayahnya seorang pedagang keliling yang membawa barang-barang dagangannya berupa bahan-bahan kebutuhan sehari-hari juga barang-barang seni seperti keris yang dia bawa dari Jawa. Dari hasil berdagang tersebut asalny mampu membeli sebidang tanah yang cukup luas.

Berbekal pengalaman serta keuletannya yang ia warisi dari orang tuanya, Ngadiman muda berhasil merampungkan sekolahnya hingga bangku SLTA. Karena keterbatasan biaya, setamat SLTA pria berkulit hitam ini mencoba mengikuti jejak ayahnya yaitu berdagang, bedanya Ngadiman sebagai pedagang pengumpul hasil pertanian. Kegiatan ini ia jalani hingga ia berkeluarga dengan dua anak (Tahun 1969 - 1972). Dengan hasil kerjanya ini, ia mampu mempunyai lahan seluas 2 (dua) Hektar, kemudian sapi, lahan perkebunan, perikanan dan sekarang ia telah, mempunyai lahan seluas kurang lebih 150 Hektar, perusahaan pengelolaan kelapa sawit, P4S dan mengelola Badan Usaha Milik Keluarga.

Setelah malang-melintang dimasa mudanya kini ia merasa paling cocok terjun di dunia penyuluhan. Hal yang sangat mendukungnya adalah lingkungan disekitarnya. Untuk membuktikan keseriusannya dibidang penyuluhan ia telah berhasil mendirikan P4S dengan kemampuan dan modal sendiri.

Yang sangat dirasakan dari kilas balik kesuksesannya saat ini adalah adanya faktor keterbatasan (mis-fit) yang ia rasakan sewaktu muda yang sering mengalami kegagalan, misalnya pernah bercita-cita menjadi seorang tentara namun tidak

kesampaian, karena merasa gagal meraih cita-citanya, pria yang punya 6 orang anak sudah dewasa dengan pendidikan S1/S2 ini terus memacu dirinya belajar tanpa merasa lelah dan malu, Ngadiman selalu berkonsultasi dengan orang-orang yang dianggap pintar, rajin membaca buku-buku apa saja yang ia minati, mengikuti kursus-kursus dan tanpa ragu-ragu selalu bekerjasama dengan Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian guna mendapatkan informasi-informasi yang ia perlukan.

### Penyuluhan Partisipatif

Pada bulan Juni 2001 yang lalu, P4S Tani Jaya telah dipercaya menjadi penyelenggara TOT-PRA bagi para calon pelatih di lapangan. Selama pelatihan berlangsung (12 hari) ia mencermati dan akhirnya berpendapat bahwa PRA adalah metoda penyuluhan yang sesuai saat ini dengan PRA, orang tidak merasa digurui, karena proses belajarnya partisipatif, sehingga memotivasi peserta menjadi berani berbicara dan berpendapat sehingga arah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani dapat tercapai. Ngadiman juga berpendapat bahwa PRA merupakan cara sederhana untuk mengajak masyarakat pedesaan berperan aktif menganalisa potensi wilayah Desanya sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya sendiri. Hal ini sangat cocok dengan apa yang disebut dengan arus bawah (bottom up), dimana segala sesuatunya tidak ditentukan lagi oleh Pemerintah Pusat tetapi dari, oleh dan untuk masyarakat sendiri.

Sewaktu Ketua P4S Tani Jaya ini ditanya mengenai DAFEP, ia mengatakan bahwa meskipun hanya terlibat sebagai penyelenggara TOT-PRA dia sempat

menyimak dan memahami sedikit tentang konsep DAFEP. Menurut DAFEP adalah salah satu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para petani dalam pelaksanaan penyuluhan dan mempromosikan usahatani yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan pendapatan. Yang



*Ngadiman yang sersan ..... serius tapi santai*

menarik dari DAFEP adalah kegiatan ini mengutamakan petani (*farmer first*), mengupayakan arus bawah (*bottom up*) dengan melibatkan petani dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penyuluhan di Desanya melalui PRA. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang bekerjasama dengan instansi dan lembaga-lembaga terkait di Kabupaten. DAFEP juga memberikan wawasan jender dan memberikan perhatian pada generasi muda pertanian dan kehutanan. Dalam setiap kegiatan DAFEP selalu menyertakan dua unsur penentu sumberdaya pertanian ini. Selanjutnya Ngadiman berkata bahwa “faktor inilah yang membedakan DAFEP dengan kegiatan lainnya. Saya juga setuju bila perempuan bisa tampil ke depan, asalkan mampu. Pesan saya pada generasi muda yang ingin terjun ke bisnis pertanian, bisnis pertanian masih merupakan ladang yang cukup menjanjikan asal bisnis ini benar-benar ditekuni dan di dalam. Untuk itu, perlu pembelajaran yang lebih luas tentang bisnis pertanian. Ia berkilah bahwa mengenai teknologi budidaya petani sudah

cukup mampu, yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan untuk mengolah hasil, pemasaran, manajemen dan kemampuan bernegosiasi dengan pihak lain. Contoh bisnis pengolahan hasil adalah bisnis biji melinjo, jika hanya dijual berupa biji atau buahnya saja, harganya akan murah tetapi bila diolah menjadi emping dan dikemas dengan bentuk yang menarik, hal ini akan menambah nilai jualnya. Tentunya teknologi yang digunakan adalah teknologi yang lokal spesifik sehingga tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan setempat. Untuk itu, generasi tua perlu memberi peluang dan kesempatan pada generasi muda untuk belajar banyak tentang pertanian. Ngadiman menambahkan bahwa hal lain yang perlu dipelajari dan dikembangkan disaat ini adalah bagaimana mengembangkan sistem informasi pasar bagi petani, kalau perlu melalui jaringan internet paling tidak di tingkat Kecamatan (BPP). Saya ingin agar internet ini menjadi suatu kebutuhan dan wacana yang akhirnya bisa menjangkau sampai ke Desa-desa. Ini memang suatu mimpi tetapi kenapa tidak? Yang menarik dari DAFEP adalah mengenalkan budaya kerjasama dengan pihak-

pihak lain, contohnya dalam pelaksanaan pelatihan TOT-PRA ini, DAFEP mempercayakan pada P4S saya, yang notabene adalah lembaga swadaya masyarakat yang tumbuh dari, untuk dan oleh petani di pedesaan.

**Penyuluhan saat ini?**

Sampai saat ini, masyarakat khususnya di Simalungun masih membutuhkan Penyuluh Pertanian. Saya tidak setuju kalau ada pernyataan bahwa Penyuluh Pertanian turun kualitasnya bahkan sampai ke titik nadir. Saya sebagai petani masih mengakui peranan penyuluh pertanian, jika kinerja atau kualitasnya turun, itu karena oknumnya saja. Saya pribadi setuju bila dimasa mendatang dikembangkan Penyuluh Pertanian Swakarsa, yang karena kemampuannya memuaskan petani maka dibayar oleh petani. Saya pribadi setuju bila dimasa mendatang dikembangkan penyuluh pertanian swakarsa. Saya sendiri telah mampu memberikan imbalan minimal Rp. 300.000,- sampai dengan Rp. 400.000,- perjam pada penyuluh perkebunan dan penyuluh perikanan. Jika hal ini berkembang, niscaya penyuluh akan menjadi profesi yang menjanjikan dan dibutuhkan oleh masyarakat serta sejajar dengan profesi dokter manusia atau hewan. Untuk itu para penyuluh harus dibekali dengan ilmu dan keterampilan yang seimbang. Saya berpendapat bahwa perluantisipasi ke depan. Sekolah-sekolah (perguruan tinggi/ sekolah kejuruan) harus lebih banyak dikembangkan jurusan agribisnis dan perlu dikembangkan penyediaan informasi sentra-sentra produksi pertanian.

Dengan berubahnya pusat pembangunan pertanian di Kabupaten, pembangunan sistem penyuluhan, juga harus dirubah strateginya. Saya setuju dengan

adanya komisi penyuluhan pertanian Kabupaten. Komisi ini tak perlu didanai khusus namun difasilitasi dan mendapat kepercayaan di dalam pengambilan keputusan yang sangat menentukan pada nasib petani. Jadi anggota komisi yang di dalamnya termasuk petani, mampu bicara di perusahaan-perusahaan setara dengan pengusaha lain tanpa dibayar asal dia diberi kesempatan yang sama dengan pengusaha/ Puskopad yang selama ini sudah banyak berperan. Saya melihat bahwa DAFEP berbeda dengan program yang lain. DAFEP program yang akan membawa pembaharuan di bidang penyuluhan yang intinya meningkatkan sumberdaya manusia pertanian dan kehutanan baik itu petugas maupun petani. Saya sangat berharap agar DAFEP berhasil karena saya pikir program ini sangat cocok dengan jaman sekarang.

**“Falsafah Hidup”**

Pria yang sudah mempunyai mobil mewah dan mempunyai lebih dari 300 ekor sapi serta mempunyai pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 30 ton/jam dan mampu berbahasa Cina ini, mempunyai falsafah hidup yang sangat sederhana yaitu falsafah ayam, ayam yang tidak butuh sekolah saja bangunnya pagi apalagi manusia yang butuh makan dan sekolah harus bangun lebih pagi. Keberhasilan saya ini, saya raih karena falsafah ini dan ini sudah saya jalani bertahun-tahun yaitu bangun pagi sebelum ayam bangun, kemudian sholat dan ngaji kemudian ke ladang dan masuk rumah baru jam 09.00 malam.

Siapa mau mencoba falsafah ayam? Silahkan agar menjadi Ngadiman. Ngadiman yang lain ..... kita masih sangat butuh orang-orang seperti Ngadiman yang ulet kerja keras dan konsisten di bidangnya. Selamat buat Bapak Ngadiman. (Sp)



*La Ode Arfah*

## LA ODE ARFAH, PENYULUH KEHUTANAN YANG AKTIF DI DAFEP

**O**rang yang namanya La Ode Arfah ini, meski penampilannya kalem dan hanya berpendidikan SLTA, namun dalam melaksanakan tugasnya sebagai Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL), tidak sekalem penampilannya dan mempunyai wawasan yang luas sebagaimana Sarjana Kehutanan. Ini terbukti, Bapak yang lahir di Raha, 7 April 1960 aktif dalam bekerja dengan penuh kreativitas.

Di saat ia bekerja sebagai PKL di Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, Prop. Sulawesi Tenggara, ia aktif melakukan pembinaan terhadap petani yang ada di daerah pesisir, khususnya pengembangan hutan mangrove. Waktu itu, Bapak yang beristrikan Ibu Suharni ini, langsung berpikir bagaimana mengamankan daerah pesisir tersebut. Jika tidak dilestarikan atau diamankan, cepat atau lambat fasilitas yang ada di sekitarnya, seperti jalan dan pemukiman akan rusak, bahkan bisa musnah karena hempasan ombak air laut, demikian kata Pak La Ode Arfah.

Alasan Pak La Ode, demikian panggilan akrabnya, melihat kondisi pantai di pesisir Kec. Kolaka yang selama ini ditumbuhi hutan bakau mulai berkurang karena pembuatan tambak udang/bandeng. Untuk

mengatasi itu, ia mempunyai inisiatif untuk segera melakukan penyuluhan kepada petani yang ada di sekitar pesisir tersebut tentang pentingnya melestarikan hutan mangrove.

Caranya, ia menganjurkan kepada petani untuk memelihara sisa-sisa hutan mangrove yang masih ada selain menganjurkan penanaman bakau. Dengan cara ini, maka fasilitas yang ada di sekitarnya seperti jalan dan pemukiman yang berdekatan dengan pantai tersebut dapat diamankan. Dengan cara penyuluhan ini, sejak 7 September 1999, petani menyadari pentingnya melestarikan hutan mangrove itu dengan cara menjaga hutan mangrove yang ada sekaligus melakukan penanaman tanaman bakau.

Awalnya, kata Pak La Ode, untuk menyadari petani bukannya hal yang gampang karena adanya 2 kepentingan masyarakat yang ada di sekitar pesisir itu, di mana satu sama lainnya saling bertolak belakang. Bagi masyarakat bukan nelayan menginginkan pesisir pantai yang potensial ditanami bakau semua untuk melindungi jalan dan pemukiman. Sedang, bagi masyarakat nelayan menghendaki tanaman bakau yang ada dikurangi agar tidak menghalangi perahu sewaktu mereka

bekerja mencari ikan.

Untuk mengatasi kedua kepentingan masyarakat itu, Pak La Ode mempunyai ide bahwa dalam penanaman bakau diatur sedemikian rupa sehingga ada celah atau jalan untuk lewatnya perahu. Dengan cara itu, kepentingan kedua masyarakat tersebut dapat terpenuhi.

Mulanya, kata Pak La Ode, baik masyarakat nelayan maupun bukan nelayan belum menyadari manfaat adanya hutan bakau. Oleh karena itu, tidak aneh bahwa tanaman bakau yang ada ditebangnya. Namun dengan kegigihan Pak La Ode dalam melakukan penyuluhan, masyarakat menjadi sadar tentang manfaat tanaman bakau tersebut. Manfaat hutan mangrove (tanaman bakau) selain dapat melindungi jalan dan pemukiman yang ada di sekitar pantai dari terjangan ombak air laut, juga sebagai tempat berlindungnya dan berkembangbiaknya biota laut yang oleh petani setempat disebut rumah ikan, seperti ikan batu, ikan malaja dan lainnya.

Ditanya mengenai sukanya sebagai PKL, Bapak kelahiran 41 tahun yang lalu ini menjawab, sukanya dikala masyarakat yang disuluhnya itu menjadi sadar pentingnya hutan mangrove. Apalagi, Kelompoktani yang dibinanya mendapat penghargaan dari pemerintah menjadi Juara I dalam rangka "Puncak Penghijauan dan Konservasi Alam Nasional Tingkat Kabupaten Kolaka". Katanya, hadiah yang diterimanya berupa radio, sepatu boot, senter dan jaring ikan.

Tidak cuma Kelompoktani yang dibinanya itu yang mendapat penghargaan, Bapak berputera 4 orang ini juga pernah mendapat penghargaan dari pemerintah

sebagai PKL. Pada tahun 1997 misalnya, secara berturut-turut menjadi Juara I PKL Tingkat Kabupaten Kolaka dan Propinsi Sulawesi Tenggara. Sedang di Tingkat Nasional, ia menyabet Juara III.

Sebagai Juara I PKL Tingkat Kabupaten Kolaka, ia mendapat hadiah dari Bapak Bupati Kab. Kolaka berupa tustel, jam dan radio. Hadiah yang sama juga diterima pada saat ia meraih Juara I PKL Tingkat Propinsi Sulawesi Tenggara dari Bapak Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara. Sedang sewaktu menjadi Juara III Tingkat Nasional, hadiah yang diterima berupa uang sebesar Rp. 2 juta,- dari Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan. Uang yang diterimanya itu, kata Pak La Ode sebagian untuk membeli buku-buku bacaan, terutama yang berkaitan dengan kehutanan seperti buku : (1) Pembangunan Kehutanan; (2) Teknik Budidaya Lebah; dan (3) Pengelolaan Hutan Mangrove. Dibelinya buku-buku itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang nantinya dapat disebarluaskan kepada petani yang menjadi partner kerjanya, tutur Pak La Ode.

### **Aktif di Proyek DAFEP**

Semula, Bapak dari Aktaharaf, Sasliansyah, Rely Afni Mauna dan Ilmainar Mauna ini bekerja sebagai PKL di Kab. Kendari, Propinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 1981-1990. Karena ia lulusan SMA, sebelum menjadi PKL dikursus terlebih dahulu mengenai penyuluhan kehutanan. Sejak tahun 1991-2001 (sekarang) ia bertugas sebagai PKL di Kabupaten Kolaka, Propinsi Sulawesi Tenggara sebagai koordinator PKL Kecamatan Kolaka. Sekarang ia

ditempatkan di Dinas Kehutanan Kab. Kolaka.

Sejak April 2001, Pak La Ode aktif di Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (DPPK) atau yang nama kerennya Decentralized Agriculture and Forestry Extension Project (DAFEP). Selama aktif di DAFEP, ia selalu terlibat pada setiap kegiatan DAFEP, khususnya yang berkaitan dengan pelatihan.

Sewaktu ada pelatihan yang dilakukan oleh Bagpro DPPK/DAFEP Kab. Kolaka misalnya, ia diberi tugas sebagai fasilitator, seperti pada saat Pelatihan TOF PRA dan budidaya kakao di Kabupaten Kolaka. Materi yang ia berikan umumnya berupa konservasi tanah yang dilakukannya secara vegetatif dan sipil teknis/terasering.

Sebelum menjadi fasilitator Pelatihan TOF PRA, kata alumni SMA Negeri I Kendari itu, terlebih dahulu mengikuti Pelatihan TOF (Training of Farmer) PRA Tingkat Kabupaten yang diselenggarakan di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan pada tanggal 24 Juni sd. 7 Juli 2001. Menurut dia, materi yang diterimanya sewaktu pelatihan dapat diaplikasikan pada saat ia menjadi fasilitator Pelatihan TOF PRA di Kabupaten Kolaka. Sebagai bukti, petani peserta Pelatihan TOF PRA dapat menerima semua materi, bahkan konsep DAFEP dirasa cocok oleh petani tersebut.

Petani peserta pelatihan merasa senang dengan apa yang menjadi konsep DAFEP. Hal ini karena menurut Pak La Ode, petani menyadari bahwa hasil PRA sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan yang mereka lakukan. Dengan cara DAFEP tersebut, kebutuhan dan keinginan petani dapat terpenuhi. Sebelum petani

mengikuti DAFEP, apa yang diberikan oleh pemerintah kepada petani tidak selamanya memenuhi kebutuhannya, bahkan petani tidak mengetahui untuk apa bantuan yang diterimanya dari pemerintah itu. Contohnya, sewaktu petani membutuhkan benih/bibit sayuran, ia mendapat bantuan pemerintah berupa tanaman buah-buahan, bahkan tanaman kayu-kayuan. Meski bantuan pemerintah itu diterimanya, namun dalam pelaksanaannya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. Namun setelah mengikuti program DAFEP, apa yang diberikan kepada petani tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan petani yang menerimanya itu.

Dasar Pak La Ode seorang yang penuh tanggung jawab dan penuh kreativitas. Pada saat mengikuti pelatihan TOF PRA Tingkat Kabupaten Gowa, ia aktif bertanya dan ia sudah berpikir bagaimana materi yang diterimanya itu dapat diaplikasikan apabila nanti ia sebagai fasilitator Pelatihan TOF PRA di Kabupaten Kolaka.

Materi yang diterima sewaktu mengikuti Pelatihan TOF PRA Tingkat Kabupaten, sebagian besar dapat diaplikasikan kepada petani peserta Pelatihan TOF PRA tersebut. Ini terbukti, petani peserta pelatihan dengan senang hati menerima materi yang diberikannya, karena materi yang disampaikan oleh fasilitator itu sesuai dengan kegiatan sehari-hari petani tersebut. Hanya materi "Transek" saja yang dirasa oleh petani cukup sulit untuk dipraktekkan, kata Pak La Ode.

Selanjutnya, ia menjelaskan, sewaktu petani menerima materi "Diagram Venn", petani peserta pelatihan itu dengan cepat dapat mendata lembaga-lembaga yang ada,

sekaligus menilai peran dan hubungan lembaga tersebut dengan masyarakat yang ada di sekitarnya. Demikian juga pada saat petani menerima materi “diagram alir”, petani dengan cekatan membuat urutan kegiatan usahatani yang mereka lakukan. Tidak cuma itu, petani sekaligus dapat mengungkapkan potensi dan masalah pada setiap kegiatan usahatani yang mereka lakukan yang selama ini mereka abaikan.

Lebih lanjut, Pak La Ode menjelaskan, sewaktu petani menerima materi “kalender musim”, petani menjadi sadar kapan melakukan penanaman dan kapan melakukan pengendalian hama penyakit sehingga mereka menjadi tahu waktu penanaman dan waktu pengendalian hama penyakit tersebut yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Sebelum mengikuti pelatihan, petani hanya melakukan penanaman dan pengendalian hama penyakit yang umum dilakukan oleh masyarakat setempat, alias bersifat tradisional konvensional.

Demikian juga materi “Peta mobilitas” dirasa petani banyak manfaatnya. Contohnya, sebelum mengikuti pelatihan, sewaktu petani berhubungan dengan pihak luar, baik itu untuk berobat, ke pasar atau yang lainnya, ia tidak mengingat-ingatnya dan mencatatnya. Namun setelah mengikuti pelatihan, apa yang mereka lakukan dengan pihak luar itu diingat dan dicatatnya untuk disesuaikan dengan usahatani yang mereka lakukan.



*DAFEP menyertakan pemuda tani dalam kegiatannya*

Lebih lanjut, kata Pak La Ode, apa yang dilakukan oleh DAFEP optimis dapat berjalan dengan lancar di Kabupaten Kolaka. Soalnya, apa yang menjadi strategi DAFEP cocok dan seiring dengan kebijaksanaan Bapak Bupati Kab. Kolaka, dimana pendekatan pembangunan di Kabupaten Kolaka itu berupa “Gerakan Swadaya Gotong Royong Terpadu Mandiri”. Dengan demikian, apa yang dilakukan DAFEP tersebut berarti seiring sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah daerah tersebut dalam mengawal otonomi daerah (Mw).

## T. FIAIDA

# SEKILAS MENGENAL WAJAH SEORANG PIONIR WANITATANI MUDA DARI INDONESIA TIMUR

*T. Fiaida adalah seorang wanitatani muda yang penuh semangat dan sudah tidak asing lagi bagi kalangan masyarakat petani di Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Wanitatani yang satu ini biasa dipanggil oleh teman-teman dan masyarakat sekitarnya dengan nama kesayangan Aida. Aida termasuk salah satu sosok wanita yang berhasil merintis kehidupannya melalui sektor pertanian dan sekaligus sebagai pemimpin gabungan kelompok wanitatani "Waru Rite" dengan alamat tempat tinggalnya di Jl. Pemuda RT. 015, RW. 07, Rite. Desa PenanaE, Kecamatan RasanaE Timur, Kabupaten Bima. Kode Pos : 84113. Telp. (0374) 43279.*



*T. Fiaida wanitatani dari Bima*

### Mengenal lebih jauh T. Fiaida

**A**ida kecil dilahirkan kurang lebih tiga puluh tahun yang lalu di Bima, sebuah kota yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur dengan keadaan alamnya yang bergunung-gunung dan cenderung tandus dengan musim kering yang panjang. Pemuda Aida setelah menamatkan sekolah SMA tahun 1989, pada awalnya belum tertarik pada bidang pertanian, walaupun dilingkungannya telah ada kelompok-kelompok tani yang sudah berkembang di bawah binaan proyek P4K. Setelah menamatkan SMA, Aida mengikuti beberapa kursus dan pelatihan untuk

meningkatkan pengetahuannya, diantaranya adalah kursus komputer, bahasa inggris, akutansi, public relation pada tahun 1993 di Mataram, sambil bekerja sebagai supervisor pada Perusahaan Tiara Group Mataram pada tahun 1990 sampai 1993. Kemudian pada tahun 1997 sampai 1998 pernah mengikuti Kursus Intermediate First Aid and CPR AEA International dan Kursus latihan Keselamatan Kerja. Pada tahun 2000 terdaftar sebagai peserta Penataran Pembinaan Orsospol, Ormas dan Sosialisasi Undang-undang Politik di Raba, Bima, NTB.

Sebelum berkecimpung di bidang

pertanian dan bergabung dalam kelompok gabungan wanitatani, Aida sudah memiliki berbagai pengalaman bekerja diantaranya pernah bekerja sebagai sekretaris pada perusahaan pertambangan di Flores NTT, akan tetapi rupanya panggilan jiwanya lebih kuat, karena melihat kaumnya di desa PenanaE masih terbelakang dan dianggap sebagai warga negara kelas dua. Menurut Aida, "Hal ini timbul karena adanya aspirasi dan kepedulian yang timbul dari beragamnya permasalahan dan keadaan yang mengakibatkan status perempuan masih memprihatinkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat terutama di perdesaan".

Dari latar belakang itulah saya tertarik untuk membentuk kelompok wanitatani yang sekarang telah bergabung dengan kelompok-kelompok lainnya dan menjadi gabungan kelompok wanitatani dimana dengan adanya wadah ini saya ingin mengkonsentrasikan kaum perempuan untuk dapat dibina dan ditumbuhkembangkan dalam satu wadah, demikian penuturan T. Fiaida yang disampaikan kepada reporter di bulan Agustus 2001 pada saat mewawancarai untuk majalah Ekstensia edisi khusus DAFEP.

Dengan dorongan dan motivasi yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungannya sejak itu Aida berubah sehingga lebih dapat memahami kesulitan kaumnya dan jiwanya mulai tumbuh menyukai dan menyenangkan bahkan mencintai bidang yang digeluti oleh para wanitatani dibidang penanganan paska panen yaitu pengolahan hasil pertanian untuk mendapatkan nilai tambah dan bidang industri rumah tangga, disamping usaha sampingan lain yaitu peternakan ayam dan itik.

Dengan bermotivasi yang kuat dan dorongan dari lingkungannya Aida mengembangkan gabungan kelompok wanitatani. Adapun visi dan misi Aida dalam mengembangkan kelompok adalah *"memberdayakan para wanitatani semaksimal mungkin agar dapat mendukung ekonomi keluarga melalui pengembangan ketrampilan yang berdasarkan pada potensi di perdesaan"*.

Pada tanggal 22 Maret 2001 merupakan lembaran baru dari berkiprahnya Aida sebagai ketua dan kawan-kawannya di Gabungan kelompok wanitatani "Waro Rite" dengan melakukan penganekaragaman dibidang usaha yaitu Usaha Industri Rumah Tangga (Abon Daging dan Ikan Tongkol, Kripik Singkong), Kain Tradisional Bima (Tenunan Songket, Jahit menjahit, Bordiran), dan Peternakan (Ayam Kampung dan Itik Lokal).

Mengelola gabungan kelompok wanitatani (GKW), katanya tidak seperti mengurus kelompok wanitatani lainnya, apabila ada modal maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mengurus GKW ini harus mempunyai kemampuan dan wawasan pola pikir yang luas bagi para pengelolanya guna mendukung kebutuhan para anggotanya.

Selanjutnya Aida mengatakan bahwa pengetahuan dan pengalaman yang luas sangat dibutuhkan terutama untuk menentukan jenis kegiatan usahatani yang akan dikembangkan oleh para anggotanya, karena tidak semua komoditas pertanian dan kehutanan sesuai dan mempunyai prospek untuk dikembangkan di Desa PenanaE. Seandainya suatu komoditas harus dikembangkan oleh GKW tentunya harus yang aspiratif dan partisipatif, sesuai dengan

kemampuan sumberdaya alam yang ada di desa dan memiliki prospek dan pangsa pasar yang baik.

Salah satu pengalaman yang paling mengesankan, menurut Aida adalah pada waktu mencoba memasarkan kain tenun songket hasil salah satu unit usaha dibawah GKW. Semula kain tenun songket tradisional bagi masyarakat perdesaan merupakan industri rumah tangga dengan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang sulit pemasarannya. Melalui kerjasama dengan kelompok PKK mengadakan pendekatan dengan pihak

menambah pangsa pasar hasil usaha para anggota GKW “Waru Rite”.

Menurut Aida, setiap suatu kegiatan usahatani tidak akan pernah jauh dari permasalahan dan tantangan yang timbul. Dalam menghadapi segala masalah yang dihadapi ia selalu mengajak para pengelola unit-unit usaha di bawah GKW “Waru Rite” untuk berdiskusi untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dan menganjurkan untuk senantiasa bermental baja dan tahan banting, karena bagi para anggotanya tidak ada istilah putus asa, kita harus belajar dari suatu kegagalan untuk



Salah satu bentuk “capacity building” wanita tani

PEMDA Bima, mengusulkan agar para aparat pemerintah di Kabupaten Bima pada hari-hari tertentu menggunakan hem yang bahannya dari hasil tenunan tradisional daerahnya. Untuk sementara hasil pendekatan dengan pihak PEMDA Bima dapat

menjadi lebih maju dan mandiri.

Ketika reporter Ekstensia menanyakan apakah suka dan dukanya dalam membina para anggota GKW “Waru Rite” yang berjumlah kurang lebih 80 orang wanitatani? Aida menjawab; “Sukanya

apabila seluruh anggota GWK mau melaksanakan dan menyadari pentingnya bekerjasama secara terpadu dalam gabungan kelompok, sedangkan dukanya apabila mereka tidak menyadari pentingnya bekerjasama atau berkolaborasi dengan sesama anggota atau pihak lain untuk mengembangkan unit-unit usaha GWK "Waro Rite".

Keberhasilannya membina kelompok wanitatani membuahkan hasil dengan terpilihnya Aida sebagai Ketua Gabungan Kelompok Wanitatani "Waro Rite", disamping itu Aida terpilih sebagai salah satu peserta wanita pada Pelatihan PRA untuk Fasilitator Kabupaten yang diselenggarakan oleh DAFEP pada bulan Juni 2001 di Mataram. Hasil dari pelatihan ini telah diterapkan oleh Aida sebagai pelatih pada Pelatihan Petugas PRA dan Survey PKS yang dilaksanakan DAFEP Kabupaten Bima pada tanggal 6 sampai dengan 18 Agustus 2001 di Bima.

Aida berpendapat bahwa **meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan adalah salah satu kunci nyata untuk menunjang keberhasi-lan para petani dalam berusahatani, disamping itu para petani, wanitatani, dan pemuda tani harus juga pro aktif dalam mengejar atau mencari dan bertanya tentang hal-hal baru yang belum pernah diketahuinya. Hal lain lagi adalah, para petani diharapkan dapat melakukan kajian sendiri atas suatu usahatani dan pangsa pasar mana yang lebih menguntungkan dan efisien pengelolaannya untuk**

**mereka terapkan sebagai suatu usaha di bidang pertanian.**

Meskipun banyak kesibukannya sebagai Ketua GWK "Waro Rite", Aida masih memiliki beberapa tugas dan jabatan dalam organisasi lain, diantaranya juga menjadi :

1. Anggota Forum Lingkungan Hidup Kabupaten Bima,
2. Anggota Dewan Kerajinan nasional daerah Kabupaten Bima di bidang Informasi dan Dokumentasi, 2000-2001,
3. Pengurus Koordinator kegiatan Kesejahteraan Sosial kabupaten Bima, 2000-2005,
4. Tim Independen Pemantau Pembangunan Daerah kabupaten Bima, 2001,
5. Support Worker Kegiatan Pemasangan Pipa di Kecamatan RasanaE Timur, Dinas perkebunan, Kabupaten Bima 2001.

Pada kesempatan ini, Aida menitipkan pesan bahwa kepada semua perempuan dimanapun berada khususnya kepada kelompok wanitatani yang sudah bergabung maupun yang belum; supaya dapat terus berjuang untuk meningkatkan kemampuannya secara profesional dan jangan merasa malu untuk mengembangkan kreativitas, karena dari hal tersebut akan muncul dengan sendirinya potensi kaum perempuan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya, terutama oleh anggota keluarganya.

Terakhir Aida mengucapkan selamat berjuang dan semoga perjuangan itu tidak sampai hanya disini saja. (Hs)

## GABUNGAN KELOMPOK WANITATANI “WARO RITE”

*Memberdayakan perempuan melalui pengembangan ketrampilan untuk menopang ekonomi keluarga tani diperdesaan*

**K**elompok Wanitatani “Waro Rite” berdomisili di Desa PenanaE, Kecamatan RasnaE Timur, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Kecamatan RasanaE Timur merupakan suatu daerah dengan topografi yang bergunung-gunung atau perbukitan yang berketinggian antara 800-900 meter dari permukaan air laut.

Lahirnya Gabungan Kelompok Wanitatani (GKW) “Waro Rite” dari aspirasi masyarakat yang peduli terhadap timbulnya beragam permasalahan dan keadaan yang mengakibatkan status

perempuan di perdesaan PenanaE Timur masih memprihatinkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses pembangunan secara keseluruhan yang selama dua dekade terakhir semakin memarginalisasi kaum perempuan khususnya di perdesaan, demikian menurut ketuanya T. Fiaida yang ditemui reporter Ekstensia di rumahnya Jl. Pemuda RT. 015, RW. 07, Rite. Desa PenanaE, Kecamatan RasanaE Timur, Kabupaten Bima. Kode Pos: 84113. Telp (0374) 43279, yang juga digunakan sebagai sekretariat Gabungan Kelompok Wanitatani “Waro Rite”.



*Sedang mendengarkan pembekalan dari Tim BIPP Bima*

Pada awalnya adalah lima tahun yang lalu dibentuk kelompok wanitatani dengan anggota 20 orang namun tidak berlanjut karena keterbatasan modal serta pembinaan. Kegiatan usahatani yang dilakukan pada mulanya hanya menanam padi dan ketela pohon, yang dari tahun ketahun pada awal perkembangannya kelompok wanitatani yang belum berupa gabungan ini tidak mengalami kemajuan yang berarti, seperti tidak maju-maju hanya berjalan di tempat saja. Berbagai upaya dan usaha seperti tidak membuat kemajuan yang berarti Masalah pokok yang dihadapi pada waktu itu selain memang kualitas sumberdaya manusianya yang tergolong masih rendah juga kondisi dan lokasi daerahnya yang tandus membuat kesulitan tersendiri bagi masyarakatnya.

Untuk mengatasi hal tersebut yang sebagian besar juga dialami oleh kelompok-kelompok wanitatani lainnya di dalam satu desa, maka pada tanggal 22 Maret 2001 didirikan Gabungan Kelompok Wanitatani (GKW) "Waro Rite" yang merupakan gabungan beberapa Kelompok Wanitatani (KWT) seperti: KWT Sori Ta'a, KWT Sori Naga, KWT Putri Duyung, KWT Mange Weri, KWT Permata, KWT Putri Giok, KWT Putri Kecubung, dan KWT Kalate Tada dengan jumlah anggota keseluruhan menjadi 80 orang wanitatani.

Latar belakang dibentuknya GKW "Waro Rite" adalah untuk mengkonsentrasikan dan memadukan potensi perempuan di Desa PananaE Timur agar dapat dibina dan ditumbuhkembangkan dalam satu wadah, sebagai media pengembangan kreatifitas dan ketrampilan masyarakat perempuan untuk meningkatkan penda-

patan keluarga melalui pertumbuhan di bidang agroindustri dan agribisnis menuju masyarakat madani, sehingga dapat tercapai tingkat keberdayaan sosial, ekonomi, hukum dan budaya masyarakat perempuan di desa kami, demikian penuturan ketuanya.

Sedangkan maksud dan tujuan dibentuk Gabungan Kelompok Wanitatani "Waro Rite" supaya tercipta usaha-usahatani yang produktif yang berkelanjutan dengan berwawasan lingkungan dan meningkatkan nilai guna dan hasil guna potensi sumberdaya perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya anggota gabungan kelompok wanitatani, sehingga mampu mencetak kader-kader penerus berkualitas yang mandiri.

Adapun program kerja yang telah dicanangkan untuk memajukan para anggotanya adalah:

#### A. *Sasaran Kedalam*

##### 1. **Konsolidasi Keanggotaan**

- 1.1. Memantapkan pelaksanaan serta disiplin anggota dan pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya,
- 1.2. Meningkatkan penertiban adminis-trasi dalam rangka selektifitas keanggotaan Badan pengurus,

##### 2. **Mengembangkan dan meningkatkan iklim usaha**

- 2.1. Mengupayakan kemasyarakatan dan pelaksanaan bidang-bidang serta sub bidang yang ada untuk membantu kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan
- 2.2. Memperdayakan perempuan semaksimal mungkin agar dapat membantu menopang ekonomi keluarga dalam hal mengembangkan ketrampilan serta

potensi lainnya,

2.3. Mengupayakan agar masyarakat khususnya perempuan dapat memperoleh fasilitas kredit dengan bunga rendah,

### 3. Profesional

3.1. Meningkatkan sumberdaya manusia melalui pembinaan, pelatihan secara intensif,

3.2. Membina masyarakat khususnya perempuan agar menjadi mandiri.

## B. Sasaran Keluar

### 1. Kemitraan

1.1. Meningkatkan hubungan kerja dengan lembaga-lembaga swasta serta pemerintah maupun instansi terkait.

1.2. Menciptakan hubungan yang harmonis dan sepeham dengan mitra kerja.

### 2. Hubungan Kemasyarakatan

2.1. Membantu masyarakat dalam meningkatkan ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan.

2.2. Berperan aktif dalam pemberdayaan daerah dan membina lingkungan di daerah kerjanya,

2.3. Memberikan kesejahteraan kepada anggota dan masyarakatnya.

Beberapa kegiatan yang sedang dan telah dilakukan selama Gabungan Kelompok Wanita Tani (GKW) "Waro Rite" berdiri adalah :

1. Bersama dengan kelompok Tani So Nggaro Rato dan para pemuda putus sekolah dari Desa Ntobo, Kecamatan RasanaE Timur membangun pengadaan instalasi kebutuhan air bersih di daerah perkebunan dan pertanian Oiu Lanco So Ndano Nae.

2. Membina para pemuda dan wanitatani dalam rangka mengembangkan industri rumah tangga dan kelompok usaha bersama.

3. Menyelenggarakan gerakan kebersihan lingkungan desa bersama unit karang taruna dan remaja masjid.

4. Mengadakan pelatihan ketrampilan berusahatani.

5. Menyelenggarakan pembekalan agama dengan melibatkan semua komponen masyarakat.

6. Menyelenggarakan pameran hasil usahatani dan kerajinan tradisional bersama Tim pembina PKK Kabupaten.

7. Membentuk kegiatan simpan pinjam dan arisan antar anggota GKW.

Walaupun berdirinya Gabungan Kelompok Wanita Tani "Waro Rite" belum ada dalam satu tahun, akan tetapi masing-masing kelompok anggota GKW sudah lebih lama terbentuk antara 2-5 tahun yang lalu, sehingga berbagai permasalahan yang ada dan dihadapi oleh para anggota kelompok GKW menjadi tanggung jawab pengurus GKW. Adapun kendala atau masalah yang dihadapi para pengurus GKW "Waro Rite" adalah:

1. Gabungan Kelompok Wanita Tani (GKW) "Waro Rite" belum mempunyai bangunan atau tempat tersendiri.

2. Peralatan administrasi dan untuk kegiatan pada masing-masing unit usaha masih terbatas.

3. Bahan baku yang tersedia di perdesaan untuk mendukung terlaksananya kegiatan pada masing-masing unit usaha masih sulit didapatkan.

4. Pemasaran produk dari hasil kegiatan

pada masing-masing unit usaha belum dapat menjangkau lebih jauh ke pangsa pasar yang bersifat nasional.

5. Kualitas dan kuantitas bahan pokok yang akan diolah oleh kegiatan pada masing-masing unit usaha belum memadai dan terjaga kontinuitasnya.
6. Permodalan untuk kegiatan pada masing-masing unit usaha masih terbatas.

Untuk mengatasi berbagai macam kendala atau permasalahan tersebut para pengurus Gabungan Kelompok Wanita tani “Waru Rite” mencoba mencari jalan keluarnya, diantaranya dengan :

1. Menggunakan Balai desa atau rumah Ketua GKW untuk kegiatan pertemuan dan pelatihan ketrampilan para anggotanya.
2. Mencari permodalan melalui Bank.
3. Menanam sendiri di lahan para anggota

kelompok bahan baku yang dibutuhkan.

4. Memasarkan sendiri produk dari masing-masing unit usaha kepada para anggota GKW dengan mengadakan arisan-arian anggota.
5. Mengikuti acara pameran yang sering diselenggarakan oleh pemerintah maupun mitra kerjanya.

Untuk menunjang berbagai kegiatan para anggota kelompok-kelompok wanita dalam GKW membentuk badan pengurus dan koordinator bidang, Adapun susunan struktur organisasinya adalah terdiri dari 1) Ketua, 2) Sekretaris, 3) Bendahara, selanjutnya dibentuk masing-masing koordinator bidang atau unit usaha, yaitu 1) Kerajinan dan Tenunan, 2) Agribisnis dan Usaha bersama, 3) Produksi, 4) Pemasaran, Sosial dan Agama, 5) Simpan Pinjam. **(Ru)**



*Kegiatan Gabungan Kelompok Wanita tani “Waru Rite”*

BIPP KULON PROGO :

## Tetap Memberdayakan Petani Walaupun Eselonnya Belum Sesuai

Lebih baik menjadi raja kecil daripada menjadi patih yang besar. Pepatah atau peribahasa tersebut sering diucapkan oleh para pejabat atau penguasa tertentu yang artinya bisa positif dan bisa negatif. Arti yang positif apabila pejabat atau penguasa yang mengatakan demikian ingin mencurahkan semua kemampuannya untuk berkreasi dalam mengelola unit kerja atau organisasi yang ia pimpin untuk keberhasilan misinya. Arti yang negatif apabila pejabat atau penguasa yang mengatakan demikian ingin menguasai semua sumberdaya dari unit kerja atau organisasi yang ia pimpinnya untuk keuntungan dan kepentingan pribadinya daripada untuk misinya.

Gambaran seperti yang dilukiskan oleh pepatah diatas tersebut, mungkin tidak dapat disamakan dengan kasus BIPP Kabupaten Kulon Progo. Pejabat Pemerintah Kabupaten, Pengelola BIPP dan Penyuluh Pertanian Kulon Progo mempunyai pendapat yang berbeda dengan pepatah tersebut, karena kepeduliannya terhadap petani untuk memberdayakannya dalam membangun Daerahnya. Berikut dilaporkan pendapat-pendapat dari Asisten II Sekwilda Kabupaten Kulon Progo, Kepala BIPP, dan Penyuluh Pertanian tentang upaya untuk memberdayakan petani di kabupaten Kulon Progo yang sempat diwawancarai di tempat



*BIPP Kulon Progo*

terpisah oleh Ekstensia di Kantornya masing-masing.

### **Ir. Subito, Asda II Kulon Progo peduli pemberdayaan petani**

Asda II Sekwilda Kabupaten Kulon Progo, Ir. Subito dengan bahasa Indonesia yang kadang-kadang diselengi dengan logat jawanya yang kental menjelaskan: Di era Globalisasi ini program yang perlu kita wujudkan yaitu pemberdayaan. La wong negara kita termasuk Kulon Progo ini mayoritas kehidupan masih di sektor pertanian, sehingga kita harus mampu jemput bola di era globalisasi itu. Salah satu yang harus kita tempuh adalah pemberdayaan dengan peningkatan sumberdaya petani, sehingga petani menjadi sasaran pokok bagi daerah-daerah yang masih didominasi

kehidupannya oleh petani, sehingga penyuluhanlah menjadi prioritas di Kulon Progo dalam rangka pemberdayaan.

Selanjutnya Asda II melanjutkan, bahwa Yang bisa jemput bola adalah program DAFEP, karena DAFEP akan membangun sarana prasarana yang digunakan sebagai Balainya dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumberdaya petani. Otomatis nanti petani menuju kemandiriannya. Ini kan perlu proses, proses ini perlu kita dukung dengan suatu kelembagaan dan sebagainya,

sehingga yang dulu pernah ada kesepakatan mengenai kelembagaan penyuluhan, harus kita pertahankan. Dengan berbagai pelaksanaan Otonomi Daerah seperti ini, kita tetap mempertahankan BIPP. BIPP harus jalan karena ini adalah merupakan satu-satunya tempat untuk mendidik petani dalam rangka kita menghadapi globalisasi, ini harus dipertahankan, walaupun setiap Daerah bermacam-macam tanggapannya, namun bagi Daerah yang masih didominasi oleh sektor pertanian, maka BIPP harus eksis, kalau nggak itu saya yakin keliru, karena titik beratnya masih di petani, demikianlah Asda II memberi tekanan dalam bicaranya.

Sambil diselingi bahasa Jawa, Asda II yang juga alumni Fakultas Peternakan UGM, melanjutkan bicaranya; *La nek*

*petani iku engko ora entuk perhatian khusus* (baca, kalau petani itu nanti tidak mendapat perhatian khusus), sambil menggunakan kalimat kiasan; ibaratnya mendorong mobil itu dari *ngiringan* (baca; samping) bukan dari belakang; melanjutkan bicaranya; Saya ini dengan Pak Basuki (Ka. BIPP) dan teman-teman penyuluh menginginkan, walaupun kita ini di era otonomi ini BIPP dijadikan satu atap dengan subsektor yang lain, namun eksistensi kelembagaan BIPP tersebut harus tetap jalan. Saat itu saya



*Ir. Subito Asda II Kulon Progo bersama Ir Basuki Ka BIPP*

dengan Sekwilda pada waktu menerima Pak Anas (Kapusbangluh), kita sampaikan bahwa kita konsisten, walaupun Sekwilda ganti, Bupati ganti, kita (maksudnya pertanian,

karena sedang bicara dengan ekstensi dan Ka BIPP) harus tetap eksis, namun otomatis kita akan menyesuaikan pendanaannya sesuai dengan proporsinya, jadi sekarang lebih menekankan sektor pertanian diutamakan, baru kesehatan, kemudian pendidikan, dengan demikian, dengan kembali menyebutkan kita, adalah pada posisi yang pertama, sehingga teman-teman (dimaksudkan; Penyuluh Pertanian) harus tetap berjuang terus untuk bisa mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka kita untuk memberi semangat petani.

Saat ditanya tentang DAFEP, Ir. Subito

menuturkan: DAFEP inilah yang terus perlu kita jabarkan dalam era globalisasi. Jadi kita (maksudnya pertanian) tetap dengan subsektor kehutanan, perkebunan, kemudian peternakan, perikanan, kelautan dan sebagainya. Adanya DAFEP ini, masing-masing petani ditingkatkan agar menjadi petani yang mampu mengambil keputusan, kemudian dia mencoba menghidupi dirinya sendiri dari sumberdaya alam yang mereka miliki, ini memerlukan suatu kiat-kiat keterpaduan, sehingga nanti petani itu tidak tergantung kepada penyuluh dan petugas yang sekarang menjadi pendamping, dalam rangka menjadi petani yang berorientasi kepada pekerjaannya yang hasilnya itu dapat “dijagakke lo pak” (maksudnya; diandalkan, dijadikan tumpuan hidupnya), demikian Asda II tersebut sambil diselingi bahasa Jawa.

Lebih lanjut Asda II dengan DAFEP memberikan harapan; Kami berharap petani itu mempunyai penghasilan yang sifatnya harian, kemudian yang bulanan, yang setengah tahunan, sehingga nanti petani kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu ada. Seperti sayur-sayurannya, ternaknya, tanaman kayunya, lebah madunya, dan sebagainya itu setiap subsektornya untuk kebutuhan hariannya dapat dicukupi, kemudian kebutuhan bulanan, setengah tahunan dan sebagainya saya rasa semua subsektor ada, itu dikerjakan bersama-sama, terpadu. Na itulah peran DAFEP itu disitu sehingga petani nanti mampu menghadapi segala tantangan dalam era globalisasi yang akan segera cepat perubahannya.

Dalam menyikapi kehadiran DAFEP baik pihak Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun petaninya, Asda II mengakhiri pembicaraannya; Kita telah

berkomunikasi dengan para Kontaktani. Tanggapannya, ternyata pada saat-saat seperti ini DAFEP sangat dibutuhkan untuk memperkuat mental petani dalam meningkatkan keberdayaannya, petani harus betul-betul didampingi secara profesional, sehingga betul-betul mampu merobah perilakunya untuk bisa berkompetisi dengan pesaingnya dan bidang-bidang lainnya yang sudah maju. Demikianlah pendapat Asda II Kabupaten Kulon Progo dalam merespon perkembangan dalam era otonomi ini khususnya berkaitan dengan upaya memberdayakan petani yang merupakan mayoritas penduduk di Kabupaten Kulon Progo.

### **BIPP dan DAFEP bersama Ir. Basuki**

Eksistensi BIPP Kabupaten Kulon Progo tidak dapat dilupakan peran Ir. Basuki yang sejak pertama berdirinya menjadi pimpinannya. Untuk lebih jelasnya berikut penuturan dan ceritanya yang disampaikan bersama Ekstensia saat ditemui ekstensia di Kantornya. Kepala BIPP itu memulai dengan menceritakan perkembangan BIPP; untuk kelembagaan penyuluhan di kabupaten Kulon Progo itu ada peningkatan. Dari dulu yang sifatnya masih non struktural menjadi bentuk struktural dalam bentuk suatu kelembagaan yang dinamakan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) dengan pengukuhan Perda No. 14 Tahun 2000.

Dengan UPTD, kita memang bertanggung jawabnya kepada Kepala Dinas, dan kebetulan Dinasnya sudah meliputi seluruh sub sektor, jadi hanya ada satu dinas dilingkup pertanian dalam arti luas, yaitu dengan nama Dinas Pertanian dan Kelautan, kemudian BIPP diberi kewenangan dalam

fungsi penyuluhan secara keseluruhan termasuk tanaman pangan, hortikultura, kehe-  
wanan, peternakan, perikanan, kehutanan,  
dan perkebunan. Diharapkan nanti  
Penyuluh Pertanian manajemennya dan  
pengelolaannya ada di satu kelembagaan  
yaitu BIPP, demikian Ir. Basuki.

Setelah ditanyakan fungsi dari BIPP  
sebagai UPTD, Ir. Basuki yang juga seorang  
Penyuluh Pertanian yang cukup senior,  
menjawab; Memang kita disertai 4 (empat)  
fungsi dalam perda itu, yaitu pertama adalah  
fungsi pe-  
ngembangan  
sumberdaya  
m a n u s i a ;  
kedua adalah  
fungsi infor-  
masi dan ko-  
munikasi di  
bidang per-  
tanian; ketiga  
adalah fungsi  
pengemba-  
ngan tekno-  
logi, jadi kita  
ini diberi juga  
kewenangan

untuk melakukan pembinaan pengkajian  
dan penerapan teknologi; dan keempat  
adalah fungsi program, khususnya program  
informasi dan penyuluhan pertanian.

Nampaknya memang dalam statusnya  
sebagai UPTD dengan eselonnya yaitu ese-  
lon IV, Kepala BIPP tidak begitu memper-  
soalkan sesuai pernyataannya, dengan  
berjiwa besar Ir. Basuki, mengatakan:  
“Untuk sementara tidak mempersoalkan  
statusnya sebagai UPTD”. Selanjutnya  
dikatakan bahwa dengan empat fungsi  
tersebut, apabila nanti dapat direalisasikan  
dengan baik, pada evaluasi Maret 2002,

diharapkan BIPP dapat ditingkatkan, paling  
tidak menjadi bentuk Kantor. Nampaknya  
memang dalam statusnya sebagai UPTD  
dengan eselonnya yaitu eselon IV, Kepala  
BIPP tidak begitu mempersoalkan, dengan  
berjiwa besar mengatakan: “Untuk semen-  
tara tidak mempersoalkan statusnya sebagai  
UPTD”.

Ditanya tentang BPP, dikatakan oleh  
Ir. Basuki; BPP sendiri merupakan kepan-  
jangan tangan dari BIPP di Kecamatan.  
Karena di Kecamatan ada Cabang Dinas,  
diharapkan  
BPP merupa-  
kan wadah-  
nya Kelom-  
pok Penyuluh  
Pertanian  
dalam pe-  
ngertian tidak  
hanya Penyul-  
uh Pertanian  
PNS, tetapi  
juga Penyul-  
uh Pertanian  
Swasta dan  
Penyuluh  
Pertanian



Ir. Basuki, Ka BIPP Kulon Progo

Swakarsa. Kelompok Penyuluh Pertanian  
tersebut yang wadahnya di BPP, lalu dalam  
operasionalisasinya dikoordinasikan oleh  
Cabang Dinas di masing-masing Keca-  
matan. Jadi harapan kami hubungan  
Kelompok Penyuluh Pertanian dengan  
Cabang Dinas di Kecamatan adalah hubu-  
ngan koordinasi; demikian Ir. Basuki.

Dalam kaitannya dengan DAFEP dinyat-  
akan oleh Kepala BIPP tersebut; Kalau  
dikaitkan dengan DAFEP, asal mulanya  
dulu, begitu BIPP didirikan pada tahun  
1997, kami melihat BIPP dengan 15  
fungsinya itu, terus terang kami merasa

malu karena belum mampu untuk melaksanakan kelima belas fungsi tersebut, setelah kita menyusun program tidak bisa dipungkiri bahwa APBD Kabupaten Kulon Progo tidak mampu memberikan dukungan terhadap program kita untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Kemudian kita mengupayakan agar dapat diikuti dalam Program DAFEP, dengan datang ke Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian. Setelah dilakukan survei dan pengamatan serta datangnya Tim Pusat ke Pemerintah Kabupaten menemui Sekwilda, kita menyusun program dan diajukan, hasilnya masuknya DAFEP di Kabupaten Kulon Progo.

Ketika ditanya mengapa begitu antusias untuk mempertahankan dan memasukkan DAFEP di Kulon Progo Ir. Basuki menjawab dengan semangat dan panjang lebar; Terus terang begini, kami menghadapi era globalisasi khususnya untuk AFTA (Asean) yang dulu akan dimulai Januari 2003, dengan keadaan petani dan Kelompoktani di Kabupaten Kulon Progo belum siap menghadapinya, kami sangat khawatir untuk selanjutnya dalam menghadapi globalisasi Internasional, kalau tidak berhati-hati, apakah nanti bisa terjadi VOC yang kedua; demikian perumpamaan atau istilah yang digunakan oleh Kepala BIPP tersebut, sebagaimana istilah yang digunakan dalam sosialisasi DAFEP dengan Bapak Camat, yaitu jangan sampai VOC kedua itu masuk. Artinya nanti petani menjadi tetap tidak berdaya, yaitu hanya mampu menyewakan tanahnya kepada mereka. Mereka punya duit, akhirnya petani hanya sebagai buruh mereka. Itulah yang saya dapat untuk meyakinkan Pemda; demikian kepala BIPP itu meyakinkan.

Dalam perkembangannya, kesepakatan

AFTA dimajukan menjadi Januari 2002, sehingga menjadi suatu dorongan dan lebih bersemangat untuk mensukseskan Program DAFEP di Kabupaten Kulon Progo. Menurut Ir. Basuki; Terus terang, DAFEP itu bukan karena melihat besarnya dananya, tapi melihat tanggung jawab kita untuk dapat mendidik petani, memberdayakan petani, sehingga petani dengan sungguh-sungguh mampu menghadapi segala tantangan di erah globalisasi, petani kita nanti akan mampu mandiri dan tangguh, baik tangguh di bidang teknologi, tangguh menghadapi berbagai gejolak pasar dan tangguh dalam menghadapi pesaingnya.

Selanjutnya Ir. Basuki sangat yakin dengan adanya Perda No. 14 Tahun 2000, akan memperkuat penyuluhan pertanian, karena dengan 4 fungsi yang sudah dibebankan kepada BIPP, maka jajaran Penyuluh Pertanian bersama aparat lainnya terkait diberikan kepercayaan penuh untuk menyelenggarakan penyuluhan pertanian, apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya. Untuk melaksanakan penyuluhan di lapangan, BIPP telah mempersiapkan Tim Penyuluhan Pertanian Lapangan (FET). Tim tersebut tidak hanya Penyuluh Pertanian PNS, tetapi juga unsur LSM dengan diseleksi yang memang betul-betul peduli terhadap nasib petani untuk memberdayakannya, disamping itu juga Penyuluh Pertanian swakarsa yang juga kita tumbuh dan kembangkan melalui DAFEP. Kita harapkan nanti Penyuluh Pertanian PNS hanya sebagai fasilitator saja sesuai kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan dana penyuluhan pertanian dari pemerintah akan berkurang, tetapi peran swasta dan petani sendiri akan bertambah.

Dukungan APBD terhadap BIPP dan

DAFEP cukup bagus; Pertama yaitu dengan dana pendampingnya sebesar 70 juta rupiah, untuk pembinaan dan sebagainya. Kedua adanya suatu proyek yang memang dikhususkan untuk memberdayakan petani, dengan nama Proyek Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Petani Pedesaan, dalam bentuk penyertaan modal bagi Kelompok tani agar dapat mengembangkan usahatani anggotanya. Dengan penyertaan modal ini dimaksudkan agar para petani dapat berlatih dengan sungguh-sungguh dalam berusahatani sehingga dapat berusahatani yang lebih baik dan lebih menguntungkan, dengan memperhatikan skala usahanya dalam skala ekonomi tertentu. Ketiga, BIPP diberikan anggaran rutin diluar gaji, yaitu untuk biaya kantor, juga biaya untuk penyuluh berupa perjalanan tetap, materi penyuluhan, dan per-lengkapan Penyuluh Pertanian, senilai lebih kurang 84 Juta rupiah. "Inilah yang kita dapat perjuangkan supaya operasionalisasi penyuluhan pertanian dapat berjalan lancar, untuk mengintensifkan penyuluhan pertanian, agar kesiapan menghadapi globalisasi lebih cepat, oleh karena itu dukungan dari DAFEP sangat kami harapkan" demikian Ir. Basuki berharap.

Tanggapan Penyuluh Pertanian terhadap keberadaan BIPP pada awal pelaksanaan otonomi di Kabupaten Kulon Progo, pada

saat dikumpulkan, khususnya bagi mereka yang sudah mempunyai masalah dalam kenaikan pangkat dan jabatannya, sehingga mendapatkan surat peringatan, dan sebagainya, menginginkan alih jabatan ke struktural. Walaupun Kepala BIPP sudah memberikan pandangan dan wacana: Kalau kita disertai atau diberikan kewenangan pengembangan sumberdaya manusia, yang paling cocok untuk mengelola atau menggarap itu, status kepegawaiannya adalah fungsional. Kalau kita menggunakan pola struktural seperti halnya BIPP sebagai UPTD yang eselonnya IVa, maka pangkat tertinggi hanya sampai IIIc. Dari segi kepangkatannya berarti sumberdaya manusia di BIPP, nggak mungkin mampu berpacu dengan petani. Justru kami ingin memberikan pandangan kepada Penyuluh Pertanian. Ternyata para Penyuluh dapat menerima pandangan kami. Ooo kalau

begitu yang memang benar, demikian ucapan para Penyuluh Pertanian. Sehingga sebagian besar mereka mempertahankan fungsionalnya, dengan pengertian yang kita sebutkan tadi. Itulah ucapan Ir. Basuki.

Berbagai program yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan

oleh Kabupaten Kulon Progo dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian termasuk DAFEP bukan tidak mempunyai permasalahan, namun beberapa



*Kegiatan IKL oleh BIPP Wonocatur di BIPP Kulon Progo*

permasalahan yang dihadapi dilaporkan oleh Kepala BIPP: Pertama, masalah kondisi SDM baik Penyuluh Pertanian dan aparat lainnya yang kinerjanya belum optimal, sehingga perlu ditingkatkan. Dalam hal ini Ir. Basuki mengumpamakan dengan berkata: "Kalau tadinya kegiatan kita dilaksanakan diukur hanya dengan jalan kaki, maka selanjutnya akan kita ajak lari". Sambil menambahkan: "ini tergantung dari SDM nya itu sendiri, untuk itu kita juga memerlukan waktu".

Masalah kedua, Aparat BIPP sebagian besar adalah Penyuluh Pertanian, kurangnya tenaga administrasi, sehingga untuk sementara Penyuluh Pertanian mengerjakan tugas-tugas administrasi. Sudah barang tentu Penyuluh Pertanian kalau diberikan tugas pekerjaan administrasi tidak bisa atau kurang trampil, apalagi masih dibebani tugas-tugas fungsional sebagai Penyuluh Pertanian, sehingga pekerjaannya menjadi lambat. Hal yang demikian secara keseluruhan akan menghambat lancarnya tugas dan pelaksanaan fungsi BIPP dan juga BPP di Kecamatan. Sehingga pernah terpikir untuk menarik Penyuluh Pertanian ke BIPP. Maka tidaklah mungkin untuk menarik Penyuluh Pertanian yang ada di BPP untuk bertugas di BIPP, sedangkan di BPP sendiri masih memerlukannya. Masalah yang ketiga, berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional dan penilaian angka kreditnya bagi para Penyuluh pertanian. Para Penyuluh Pertanian tidak diakui lagi sebagai pejabat fungsional sehingga tunjangan jabatannya tidak bisa dibayarkan. Penilaian angka kreditnya juga tidak dilakukan, sehingga kenaikan pangkat sebagai jabatan fungsional menjadi mandek. Hal ini akan mempengaruhi terhadap iklim kerjanya, sehingga akan mempengaruhi

juga kinerja penyuluhan pertanian.

### **Drh. Sabar Widodo, tidak ada masalah**

Selama Penyuluh Pertanian tetap menjadi satu kesatuan, maka Penyuluh Pertanian akan dapat mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Demikian Sabar Widodo yang satu-satunya Penyuluh Pertanian yang Drh. Di Kulon Progo. Kemudian melanjutkan bicaranya; Tentang pengembangan profesi Penyuluh yang ada diharapkan nanti menekuni bidang-bidang keahlian tertentu, sehingga para Penyuluh Pertanian, baik di Kecamatan maupun di Kabupaten dalam memberikan pelayanan jasa pendidikan akan selalu dalam suatu tim, karena petani yang dibimbingnya mempunyai usahatani yang bermacam-macam. Dengan demikian para Penyuluh pertanian disiapkan kemampuannya lebih dulu, baru petani dapat ditingkatkan kemampuannya dan keberdayaannya.

Tanggapan Drh. Sabar Widodo yang Penyuluh Pertanian, sehubungan BIPP menjadi UPTD dengan eselonnya IVA tentang pengembangan sistem penyuluhan pertanian; Kalau memang masih satu koridor, satu kesatuan, tidak ada masalah, malahan justru akan berkembang. Sebaliknya kalau nanti Penyuluh Pertanian yang dari berbagai keahlian ini terpecah belah, menurut pendapat kami, misi penyuluhan pertanian tidak akan tercapai. Demikian pendapat Penyuluh Pertanian yang juga sebagai Pinpro DAFEP. Pendapatnya terhadap DAFEP sendiri sangatlah baik, yaitu untuk mendukung atau memperkuat Penyuluhan Pertanian di Kulon Progo. Baik dalam memberdayakan petani maupun untuk meningkatkan kapasitas aparat dan Penyuluh Pertanian menjadi

Penyuluh Pertanian yang profesional, sehingga dapat membangun sistem penyuluhan pertanian partisipatif.

Pendapatnya dalam rangka dukungan Pemda untuk meningkatkan profesionalisme Penyuluh Pertanian, dengan ditanganinya dalam satu wadah itu merupakan salah satu faktor yang positif. Namun setelah ditanya tentang tunjangan jabatan fungsional yang belum diberikan, Drh Sabar Widodo berkomentar: Tunjangan itu tergantung Pemda, karena kalau Penyuluh Pertanian terlalu menuntut, sedangkan

tidak bisa memberdayakan petani, maka kita akan dituntut.

Mengingat situasinya yang memang belum memungkinkan pada waktu ini untuk membayar tunjangan Jabatan fungsional, karena Pemda DAU-nya belum digunakan untuk membayar tunjangan. Penyuluh Pertanian masih ada di Propinsi baik status kepegawaiannya maupun gajinya. Walaupun BIPP melalui Kabupaten telah mengusulkan gaji Penyuluh Pertanian dengan tunjangannya, tetapi oleh Propinsi belum dapat membayar tunjangannya, yang

petani  
m a s i h  
banyak yang  
m i s k i n ,  
bisa-bisa  
kita nanti di  
demo oleh  
petani. Yang  
penting  
bekerja  
dengan baik,  
k a l a u  
ternyata ada  
hasilnya,  
kan akan  
d i p e r -  
h a t i k a n ,  
i t u l a h  
p r o f e s i .



*Drh. Sabar Widodo diruang kerjanya*

Sampai Sabar Widodo mengibaratkan seorang Dokter; “Tidak ada Dokter menanyakan kepada pasiennya, apa punya uang atau tidak”. Sambil bertanya dengan nada meyakinkan kepada Ekstensia yang mewawancarainya “Tidak ada to pak”. Lalu melanjutkan bicaranya; Jangan ikut-ikutan euphoria, terus kita lupa, terus kita hanya menuntut. Kalau tunjangan diberikan dan dinaikkan, tetapi kita bekerjanya ternyata

katanya sampai Desember. Sebelumnya sempat ada dua pendapat berbeda, apa tunjangan atau insentif, tetapi karena jabatan fungsional, itu berarti tunjangan. Rencananya tunjangan Penyuluh Pertanian akan dibayarkan setelah diakui kembali bahwa Penyuluh Pertanian adalah Pejabat Fungsional, setelah status kepegawaian dan gajinya sudah diserahkan ke kabupaten.

Berkecenderungan belum diakuinya Jabatan

Penyuluh Pertanian, ada Penyuluh Pertanian yang nanti menyatakan akan menjadi Penyuluh Pertanian lagi, ada yang me-nyatakan tidak lagi menjadi Penyuluh Pertanian dan ada yang menyerahkan kepada pemerintah, sehingga ada tiga versi. mengomentari itu Sabar Widodo juga mempunyai pendapat tiga versi untuk pengangkatan kembali Penyuluh Pertanian, yaitu: pertama, semua Penyuluh Pertanian yang ada seperti semula diangkat kembali; Kedua, Penyuluh yang berminat untuk diangkat kembali supaya mendaftar; ketiga, yang berminat diseleksi.

Dari ketiga versi tersebut semua ada kelemahannya, kalau diangkat semua baik yang rajin, malas dan lemah diangkat semua, sehingga yang lemah, malas akan berpengaruh kepada yang rajin, ibaratnya “menunggu lapuknya batang kering dimusim kemarau dan hujan”, sehingga akan menghentikan Penyuluh Pertanian sebagaimana aturan Menpan, 6 tahun diberhentikan, ini yang kasihan yang sregap (baca: rajin). Kelemahan yang kedua yaitu masih tetap ada yang lemah dan malas, walaupun mungkin persentasenya kecil dan jumlah keseluruhannya menjadi lebih sedikit. Kelemahan yang ketiga, melalui pre test kemungkinan jumlah penyuluhnya menjadi sedikit, tetapi mereka betul-betul punya minat dan berkemampuan, sehingga dimungkinkan tunjangannya menjadi besar. “Ndak apa bayar mahal pak, kalau saya pikir begitu, tunjangan mahal ndak masalah”. Ucapan Sabar Widodo itu sambil kembali berphilosofi dengan mengucapkan pepatah: “Membuka gunung tidak cukup dengan seribu raksasa, namun menghancurkannya cukup dengan satu dua orang” gitu pak, bicaranya kepada Ekstensia yang mewawancarainya.. Sambil melanjutkan

bicaranya: Melalui konsep yang demikian, Pemda tinggal memilih yang mana.

Dalam hal kemampuan Penyuluh Pertanian dengan nada mendeskreditkan. Adanya petani yang lebih maju, Penyuluh Pertanian kalah, Sabar Widodo dengan nada membela Penyuluh Pertanian, mengatakan; Berapa jumlahnya, berapa volumenya petani yang maju. Kalau petani dari seribu ada satu dua itu lumrah (baca; wajar). Dalam pendapatan para Petani kalau mengacu pada garis kemiskinan sebagian besar petani di Kulon Progo masih dibawahnya. Namun Penyuluh Pertanian tidak ada yang miskin tidak kalah dengan sebagian besar petani. Soal dalam kehidupannya masih merasa kurang itu bukan miskin, tetapi masalah lain. Orang yang gajinya 3 juta rupiah, tetapi pengeluarannya 4 juta rupiah, itu bukan miskin. Maka seharusnya para Penyuluh dapat lebih meningkatkan kemampuannya dari pada sebagian petani. Dengan adanya DAFEP ternyata dapat diterima oleh petani dengan baik, apalagi setelah diadakan pelatihan-pelatihan, ternyata petani sebagian besar menyatakan positif terhadap DAFEP.

Dari pendapat-pendapat para penentu kebijakan, pengelola BIPP dan Penyuluh Pertanian tersebut, ternyata Kabupaten Kulon Progo yang mayoritas penduduknya adalah petani, dengan sebagian besar masih merupakan petani kecil tidak pernah berpikir akan menjadi raja kecil atau menjadi patih yang besar, tetapi lebih penting adalah bagaimana dapat mencurahkan semua kemampuannya untuk berkreasi dalam rangka keberhasilan misi dari organisasi dimana dia berada, untuk memberdayakan petani melalui pendekatan partisipatif, sesuai dengan partisipasi petani dan masyarakat lainnya dalam membangun Daerahnya. Semoga berhasil. (Sb)

## Kepedulian Kabupaten Magelang Dalam Memberdayakan Petani : Memperkuat BIPP Untuk Membangun Sistem Penyuluhan Pertanian Partisipatif Bersama DAFEP

**B**agaimana diayun-ayun gelombang ditengah lautan luas, dihempas badai kesana-kemari, tidak mementu mau kemana dan tidak dapat kembali mencapai daratan, itulah ilustrasi petani kita pada masa yang lalu, karena petani bukan menjadi nakodanya, hanya menumpang dan ngikut dalam kapal yang dinakodai orang lain, sehingga petani tidak bisa mengarahkan atau membelokkan arah yang sesuai dengan tujuannya. Kemudian dengan posisi petani yang masih sebagian besar seperti apa yang diilustrasikan, datanglah gelombang baru yang disebut otonomi atau desentralisasi.

Akibat menafsirkan otonomi yang belum benar karena

datangnya gelombang otonomi yang tiba-tiba, menjadikan semacam euphoria kebebasan yang nampaknya sementara ini sulit untuk dibendung. Namun secara perlahan-lahan akan dapat diatasi asal jangan direspon secara emosional, karena

memang gelombangnya untuk melaksanakan otonomi sangatlah kuat yang bahkan ekstremnya sebagaimana ucapan atau yel-yel yang sering diucapkan oleh salah satu parti politik yaitu “merdeka”. Itulah ilustrasi yang mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan kepada aparat dan masyarakat lainnya yang berkecimpung di bidang pertanian khususnya penyuluhan pertanian untuk tidak ikut-ikutan.

### Mempertahankan eksistensi BIPP



*BIPP Kab. Magelang*

Euphoria kebebasan yang sedang terjadi di sebagian besar Kabupaten/Kota di seluruh wilayah negara kita ini, ternyata oleh Pemerintah Kabupaten Magelang

ditanggapi dengan tidak emosional. Khususnya dalam upaya untuk lebih memberdayakan petani melalui sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif, dengan tetap mempertahankan eksistensi BIPP sebagai wadahnya. BIPP Kabupaten

Magelang awal berdirinya adalah menindaklanjuti SKB Mendagri dan Mentan Tahun 1996 yang direspon positif oleh Bupati Magelang dengan memerintahkan kepada jajarannya yang berkompeten dibantu para Penyuluh Pertanian untuk merintis pendirian BIPP. Melihat hal yang demikian menandakan bahwa dari sejak awalnya dukungan Pemerintah Kabupaten Magelang terhadap BIPP selalu konsisten.

Setelah beberapa lama BIPP Kabupaten Magelang berdiri, ternyata BIPP dapat menyelenggarakan penyuluhan pertanian dan mengkoordinasikannya dengan baik. Karena dinilai oleh Pemerintah Daerah bahwa BIPP tetap eksis dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik, sehingga Bupati Magelang tetap mempertahankan BIPP tersebut. Selain itu berdirinya BIPP sebetulnya juga didasari bahwa prioritas pembangunan di kabupaten Magelang adalah dibidang pertanian, karena 80% penduduk Kabupaten Magelang hidup dari sektor pertanian, baik yang melaksanakan usaha tani langsung maupun yang hanya bergantung dari sektor pertanian, yaitu buruh tani dan pengolah hasil pertanian.

Berdasarkan prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang di bidang pertanian Bupati pada era otonomi ini memandang bahwa BIPP harus tetap eksis. Walaupun sebelum pelaksanaan otonomi sudah diajukan untuk menjadi Perda, namun adanya perbedaan pendapat antara eksekutif dengan DPRD tentang keberadaan BIPP. Nampaknya memang masih ada pihak yang belum memahami betul tentang peran penyuluhan pertanian. Pengertiannya hanya terbatas bahwa penyuluhan pertanian dianggap tidak secara langsung menghasil-

kan PAD, sehingga untuk instansi yang tidak menghasilkan PAD dibelakangkan dulu. Untuk meleraikan atau menengahi perbedaan pendapat tersebut, maka Bupati mengambil jalan tengah, agar BIPP tetap berdiri. Melalui Surat Keputusan Bupati sementara, BIPP status quo dulu agar kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian yang telah dirintis pada periode sebelum ini, dapat terus berjalan, sehingga tidak akan terjadi shock. Dengan demikian maka BIPP tidak dibahas dulu di DPRD Kabupaten Magelang.

Selanjutnya BIPP Kabupaten Magelang dipantau terus oleh DPRD Kabupaten, masyarakat dan lain sebagainya. Dari hasil pemantauan keberadaan BIPP ternyata masih diperlukan. Kesimpulan tersebut dapat diambil dari berbagai forum seperti Temu Wicara yang tujuannya untuk menggali berbagai pendapat-pendapat baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat petani, didapat banyak masukan-masukan supaya BIPP dengan seluruh penyuluhnya menyatu dalam satu korps dengan satu wadah, yaitu BIPP. Kesimpulannya yaitu agar BIPP dapat diproses kembali untuk diajukan menjadi Perda sesuai aturan yang ada, bahwa BIPP sebagai Unit Teknis Daerah, bisa dalam bentuk UPTD, Kantor, atau Badan.

Mengapa BIPP harus tetap eksis pada era otonomi sekarang ini. Jawabannya adalah karena BIPP sangat diperlukan untuk memberdayakan petani. Pemberdayaan petani yang dilakukan BIPP adalah melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif ini sesuai dengan pengertian otonomi yang sebenarnya, yaitu mengatur dan mengurus masyarakat petani sesuai dengan aspirasinya. Seperti kita ketahui

satunya kelembagaan yang mengembangkan sistem penyuluhan partisipatif dalam memberdayakan petani, harus tetap dipertahankan eksistensinya untuk keberhasilan pembangunan Kabupaten Magelang.

Dengan berbagai pertimbangan, eksistensi BIPP di Kabupaten Magelang akan tetap dipertahankan yang diwujudkan dalam bentuk Kantor, dengan nama barunya yaitu Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan ketahanan Pangan atau disingkat KIPPK. Seperti yang disampaikan oleh Ir. Wiyoto Kepala BIPP Kabupaten Magelang, bahwa struktur KIPPK terdiri dari Kepala kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi Administrasi umum, Kepegawaian, dan Keuangan, disertai dengan tiga Seksi, yaitu Seksi Penyuluhan, Seksi Informasi, dan Seksi Ketahanan Pangan. Seksi Penyuluhan bertugas mulai dari menyusun program, melaksanakan sampai pada monitoring dan evaluasinya. Seksi Informasi bertugas mengakses, mengkaji dan mendistribusikan. Sedangkan Seksi Ketahanan Pangan bertugas berkaitan dengan intensifikasi pertanian, ketersediaan pangan, sampai pada deskripsi ketahanan pangannya.

Keberadaan Kelompok Penyuluh Pertanian di KIPPK diwadahi dengan sarang tawon tersendiri dibawah Kepala KIPPK. Kelompok Jabatan fungsional di



*Ir. Wiyoto Ka BIPP Kab. Magelang*

KIPPK melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai dengan spesialisasi dan keahliannya untuk terlaksananya tugas dan fungsi KIPPK. Dalam operasionalisasinya Penyuluh Pertanian bekerjasama dan difasilitasi oleh para pejabat struktural, dimana Penyuluh pertanian merupakan pelaksana utama dari fungsi-fungsi yang dibebankan kepada KIPPK melalui mekanisme yang diatur oleh organisasi, Kepala

KIPPK mengelolanya.

Keberhasilan pembangunan pertanian di Kabupaten Magelang tidak dapat lepas dari peranan Dinas-Dinas lingkup pertanian, yang ada Dua Dinas, yaitu Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, kemudian Dinas Peternakan dan Perikanan. Dinas-Dinas tersebut dengan KIPPK mempunyai misi yang sama yaitu sama-sama memberdayakan petani sesuai dengan fungsinya masing-masing yaitu fungsi pelayanan dan fungsi penyuluhan. Oleh karena itu agar dapat saling mendukung, maka mekanisme atau tata hubungan kerjanya akan diatur bersama dengan duduk bersama sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang menyebabkan tidak berdayaguna dan berhasil guna.

Dengan gedungnya yang berasal dari BPP ditambah dengan bangunan dari dana SPL/OECF yang cukup megah, disertai berbagai fasilitas ruangan display, ruang

pertemuan berupa pendopo Joglo, ruang pelatihan dan asrama, serta ruangan-ruangan lainnya, adalah memenuhi persyaratan untuk siap menjalankan tugasnya sesuai yang dibebankan sebagai KIPPK dengan strukturnya seperti yang direncanakan tersebut. Hanya menunggu legitimasi oleh DPR Kabupa-ten yang sudah dalam proses tahap akhirnya. Karena rancangan Perdanya sudah disiapkan dan sudah dibahas di tim analis organisasi, disertai dengan memperhalus kalimat-kalimatnya oleh bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga dalam bulan Oktober 2001 dapat diajukan ke DPR Kabupaten untuk dibahas dan akhir tahun 2001 sudah dapat dikeluarkan Perdanya.

### Respon positif terhadap DAFEP

Niat Kabupaten Magelang untuk memperkuat BIPP dapat dilihat dengan dukungan dana APBD baik berupa dana pembangunan dan rutin yang telah dikeluarkan sejak tahun 1999, tahun 2000 dan tahun 2001 tidak pernah putus, menunjukkan kesungguhannya dalam membangun sistem penyuluhan pertanian, yaitu sistem penyuluhan partisipatif. Hal tersebut dapat dilihat dengan adanya dana pendamping yang disediakan untuk menunjang Proyek Bantuan Luar Negeri yaitu Proyek

Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (DAFEP), yang semula disediakan dana kurang lebih 50 Juta Rupiah, pada tahun 2001 menjadi 84 Juta Rupiah.

Adanya DAFEP akan memperkuat kelembagaan BIPP, karena didalamnya ada kegiatan-kegiatan yang ditujukan meningkatkan kapasitas Penyuluh Pertanian, juga melengkapi sarana prasarana kelembagaan BIPP yang fokusnya adalah kegiatan-kegiatan untuk memberdayakan petani melalui pelatihan dan bimbingan agar petani mampu mengidentifikasi, menganalisis potensi lahan dan wilayahnya, mengetahui masalah-masalah berkaitan dengan usahanya dan individunya, mengambil keputusan sendiri dalam merencanakan

usahanya dan melaksanakannya yang difasilitasi oleh Penyuluh Pertanian dan aparat lainnya untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.



Pelatihan TOT PRA bagi petugas

Ada keyakinan kelembagaan BIPP akan menjadi lebih kuat lagi dengan konsistennya pernyataan Bupati Magelang saat menjawab pertanyaan Dely P. Gapasin (Bank Dunia) yang berkunjung ke Magelang pada Bulan Agustus. Saat ditanya oleh bu Dely: "Seandainya kami akan mengajukan kegiatan tambahan kepada Bank Dunia apakah APBD bisa menambah". Pak Bupati

dengan tegas dan mantapnya menjawab: "Saya siap, karena tanpa DAFEP pun saya berkewajiban untuk mengalokasikan dana untuk memberdayakan petani saya". Begitulah laporan Ir. Wiyoto Kepala BIPP saat diwawancarai Ekstensia di kantornya. Bahkan Ir. Wiyoto yang sering menjadi pembawa acara resepsi pengantin adat Jawa menambahkan: "Kami optimis bahwa dimasa yang akan datang, apalagi didukung dengan DAFEP, maka kelembagaan BIPP, Insya Allah, akan semakin eksis".

Sudah selayaknya respon Bupati Kabupaten Magelang sangat positif terhadap DAFEP, karena keinginan kuatnya untuk memberdayakan petani yang merupakan bagian terbesar warganya, sehingga jajaran pemerintah Kabupaten Magelang menyambut dengan baik kedatangan wakil Bank Dunia ke Kabupaten Magelang. Ini menunjukkan bahwa memang terhadap DAFEP Bupati-nya merespon sangat bagus sekali. Apalagi dengan kesiapannya menyediakan dana pendamping secara proporsional. Karena memang ada pos-pos pendanaan yang tidak bisa disediakan oleh DAFEP, antara lain kegiatan Komisi Penyuluhan yang sudah dibentuk melalui Keputusan Bupati, baik untuk biaya perjalanan maupun pertemuan-pertemuan komisi, serta lain-lain kegiatan yang memang tidak dapat dibiayai oleh DAFEP, tapi harus dibiayai oleh Kabupaten.

Kepentingan Komisi Penyuluhan adalah membantu Bupati dalam penetapan kebijaksanaan, penyusunan program dan proyek penyuluhan pertanian, serta memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian di Kabupaten Magelang. Semangat sudah

ditunjukkan oleh Bupati Magelang dengan membentuk Komisi Penyuluhan Pertanian. Namun karena jumlahnya terlalu banyak, perlu dirampingkan dengan mengurangi anggotanya dari unsur yang tidak langsung terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, sesuai saran dari wakil Bank Dunia jumlahnya maksimal 15 orang.

Kabupaten Magelang merespon DAFEP dengan positif, walaupun baru dimulai tahun 2001. Riilnya pada bulan Juni, yang diawali dengan mengikutkan kegiatan-kegiatan pembinaan oleh Pusat dalam rangka pembekalan petugas proyek yaitu, pelatihan manajemen proyek, pelatihan keuangan bagi Bendaharawan Proyek dan pembekalan tim konsultan. Kegiatan DAFEP bergulir di Daerah dengan kegiatan-kegiatan antara lain yaitu: Pelatihan TOT PRA yang diikuti 5 orang di Kulon Progo, dilanjutkan dengan pelatihan TOF di Kabupaten Magelang, Pelatihan Kepemimpinan Petani (UPKG) yang dibentuk sebagai pelaksana gabungan di tingkat Desa, Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengelola pelaksana DAFEP di Pedesaan.

Latihan kepemimpinan petani tersebut merupakan kegiatan yang mendasar sebagai upaya pemberdayaan petani melalui pendekatan partisipatif yang dilakukan oleh DAFEP. Identifikasi penetapan desa binaan telah menetapkan 20 Desa binaan dari 10 Kecamatan, jadi masing-masing Kecamatan 2 Desa. Pada saat Ekstensia berkunjung ke Kabupaten Magelang sedang dipersiapkan kegiatan PRA yang pada akhir Oktober akan dilaksanakan, dimana para petani pesertanya sebagai kader telah ditetapkan sebanyak 25 orang tiap Desa, sehingga keseluruhannya ada 500 orang

petani. Dengan demikian akan dapat segera disusun perencanaan keluarga, Desa dan Kecamatan. Menurut H. Iing Sutisna M. Ed. Konsultan DAFEP Kabupaten Magelang, diperkirakan setelah PRA pada akhir Oktober perencanaan Kecamatan sudah dapat disusun yang akan diolah dan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Lapangan (FET) yang anggotanya juga ada unsur petaninya.

Respon petani Kabupaten Magelang khususnya para petani pesertanya, nampaknya cukup bagus terhadap DAFEP, walaupun sebelum dilakukan sosialisasi para petani agak ragu karena DAFEP tidak seperti proyek lain sebelumnya yang memberikan input-input phisik seperti sarana produksi, bibit dan lain-lain, tetapi DAFEP dalam bentuk peningkatan pemberdayaan berupa pelatihan, magang, uji coba dan lain-lain. Namun setelah dilakukan sosialisasi pada setiap kesempatan bertemu petani, akhirnya para petani memahami dan mengerti betul, sehingga responnya terhadap DAFEP menjadi positif.



Ir. Wiyoto / Ka BIPP Magelang menyerahkan sertifikat pelatihan TOT PRA

### Profesionalisme Penyuluh Pertanian

Angin segar dirasakan oleh para Penyuluh Pertanian dengan adanya DAFEP

di Kabupaten Magelang, khususnya Penyuluh Pertanian yang terlibat dalam DAFEP yaitu sebanyak 57 orang pada 10 Kecamatan, sehingga masing-masing Kecamatan berkisar antar 5 sampai 7 orang. Angin segar tersebut oleh Para Penyuluh Pertanian disambut dengan gembira, karena dianggap akan dapat memberikan kesegaran yang selama ini dinanti-nantikan. Penyuluh Pertanian memang selama ini lebih banyak terlibat dalam kegiatan pelayanan, dan lebih berat lagi dengan predikatnya sebagai ujung tombak pembangunan, tetapi sangat kurang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai mitranya petani untuk melaksanakan penyuluhan yang partisipatif.

Disamping itu Penyuluh Pertanian sangat kurang mendapatkan pelatihan-pelatihan. Dengan adanya DAFEP para Penyuluh Pertanian tersebut dapat mengikuti pelatihan antara lain pelatihan Metode

Penyuluhan Partisipatif dan pelatihan Perencanaan Partisipatif. Dengan pelatihan tersebut para Penyuluh Pertanian dapat meningkatkan keberdayaan dan profesionalisme, sehingga

akan dapat memfasilitasi dan memotivasi peningkatan keberdayaan petani. Nampaknya keluarnya Keputusan

Menkowsabngpan no. 19 tahun 1999 ikut andil dalam memotivasi para Penyuluh Pertanian di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan profesionalismenya. Keputusan Menkowsabngpan yang mensyaratkan bahwa Penyuluh Pertanian harus mempunyai pendidikan minimal D3 menjadikan cambuk, mendorong untuk terus belajar walaupun sambil terus bekerja, seperti yang dianjurkan oleh Kepala BIPP Magelang kepada para Penyuluh Pertanian di Kabupaten Magelang.

Dengan berbagai upaya dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, seluruh Penyuluh Pertanian di Kabupaten Magelang dapat melanjutkan studinya yang tidak hanya untuk memenuhi persyaratan sesuai Menkowsabngpan, tetap juga untuk meningkatkan profesionalismenya. Para Penyuluh Pertanian tersebut ada yang mengikuti program penyetaraan yang dilakukan oleh Departemen Pertanian, program PTPL ataupun program UT, bahkan banyak yang swadaya di Universitas ataupun Politeknik Pertanian di Magelang. Ini merupakan suatu yang mengembirakan agar para penyuluh pertanian dapat mengikuti perkembangan pembangunan maupun perkembangan kemampuan petani sebagai mitranya.

Pendayagunaan Penyuluh Pertanian sesuai dengan profesi dan keahliannya merupakan juga salah satu upaya peningkatan profesionalisme. Sebagaimana yang dilakukan oleh BIPP Kabupaten Magelang khususnya Penyuluh Pertanian yang bertugas di BIPP sebanyak 15 Orang, didayagunakan berdasarkan keahlian, walaupun masih ada yang merangkap tugas struktural atau administrasi untuk memper-

lancar tugas dan fungsi BIPP, karena keterbatasan tenaga. Namun secara bertahap akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian setelah mendapatkan tenaga yang cukup. Bidang-bidang keahlian yang dikembangkan meliputi bidang media dan siaran, informasi, program, pelatihan, kemitraan, dan lain-lain. Dalam upaya mengembangkan keahlian tersebut dilakukan kursus atau pelatihan bekerjasama antara lain dengan Bagian Humas dan Pusat Pelatihan Multi Media (MMTC) di Yogyakarta.

Membangun tim penyuluhan pertanian lapangan (FET) yang kompak juga merupakan upaya peningkatan profesionalisme Penyuluh Pertanian. FET merupakan tim yang melaksanakan penyuluhan di lapangan, sehingga pembentukan tim harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. FET untuk Kabupaten Magelang sedang disiapkan, namun belum dapat operasional, karena disamping belum adanya persepsi yang sama tentang FET, juga memang kegiatan DAFEP di lapangan baru dalam tahap awal yaitu baru akan melakukan PRA. Pendapat Kepala BIPP Magelang bahwa FET adalah komisi di tingkat Kecamatan, belum dapat direalisasikan, karena masih banyak pendapat lain yang perlu dirumuskan bersama khususnya Pusat dalam hal ini Pusat Pengembangan Penyuluhan Pertanian yang pada saat tulisan ini ditulis belum dapat memfasilitasi untuk dapat merumuskan tentang FET itu, sehingga dapat dipedomani oleh semua Kabupaten lokasi DAFEP.

Pengembangan pasar agribisnis tidak akan ada tujuan yang tercapai tanpa upaya dan langkah yang ditempuh oleh BIPP. Penyuluhan Pertanian yang diselenggarakan



*Konsultasi DAFEP berdiskusi dengan Pimpinan DAFEP Kab. Magelang*

oleh BIPP, mempunyai tugas pokok adalah mendidik agar mampu mengelola usahatani agribisnis yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan keberdayaannya, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh BIPP Magelang, disamping bimbingan teknis atau teknologi budidayanya untuk meningkatkan produktivitasnya, bimbingan dan pembinaan pasar menjadi kunci pokok keberhasilan petani.

Pengembangan pemasaran dilakukan melalui pola kemitraan usaha untuk membangun jaringan pemasaran antara petani dan pengusaha agribisnis lainnya. Dalam membantu petani untuk mendapatkan informasi pasar dengan memanfaatkan fasilitas internet yang telah dimiliki oleh BIPP, sekali seminggu. Informasi pasar yang didapat dari internet disebarluaskan kepada petani baik secara langsung pada pertemuan-pertemuan, maupun melalui telepon atau kontak langsung hingga terjadi

transaksi bisnis dan membangun jaringan pemasaran.

Beberapa komoditas yang telah dapat bekerjasama melalui pola kemitraan usaha, antara lain, antara petani hortikultura dengan PT Wonderindo, P4S Putra Bangsa dengan Bob Sadino, Yayasan abdi dengan petani buncis Perancis, petani kapri dengan pengusaha Taiwan, dan lain-lainnya. Tidak bisa

dipungkiri peranan BIPP dalam keberhasilan para petani-petani tersebut, karena BIPP memang dalam memberdayakan petani, tidak hanya mengembangkan sistem penyuluhan pertanian partisipatif, tetapi juga mengupayakan berbagai fasilitas sarana pengembangan usaha petani. Koordinasi dengan aparat pelayanan yaitu Dinas Pertanian, dapat memfasilitasi petani antara lain berupa pengadaan penyimpanan (cold storage) untuk sayur-sayuran, disamping sarana pasca panen lainnya seperti jaring untuk kantong/wadah kapri.

Upaya pengadaan fasilitas penyimpanan adalah bagian untuk menciptakan jaringan pasar. Diharapkan para petani dan pedagang menggunakan fasilitas penyimpanan tersebut. Ditempat dimana dibangun fasilitas penyimpanan akan terjadi transaksi antara petani dan pedagang, yang berarti tercipta pasar agribisnis yang lebih besar daripada pasar yang sudah ada sebelum dibangun fasilitas penyimpanan. Adanya



*Kunjungan Wakil Bank Dunia dan Pimpinan DAFEP ke Kab. Magelang*

pasar agribisnis yang omzetnya besar maka para petani baik secara perorangan maupun secara berkelompok dapat dengan mudah memasarkan produknya. Dengan dibangunnya jaringan pasar yang dekat dengan petani, akan lebih menguntungkan petani, sehingga petaninya lebih mudah digerakkan untuk dapat meningkatkan produktivitas yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Harapan yang selama ini didambakan petani di kabupaten Magelang untuk dapat meningkatkan keberdayaannya, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya, akan segera terwujud, kalau para penentu kebijakan dapat memberikan dukungan materiil dan moril kepada para Penyuluh Pertanian yang dipimpin oleh Kepala BIPP dapat membangun sistem penyuluhan pertanian yang partisipatif

dengan wadah Kelembagaan Penyuluhan yang kuat. Tanda-tanda kearah itu sudah mulai terlihat di Kabupaten Magelang.

Tanda-tanda tersebut jangan sampai tersapu badai euphoria kebebasan yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan aturan yang berlaku pada era otonomi. Jangan sampai ilustrasi petani yang diayun-ayun gelombang ditengah lautan luas, dihempas badai kesana-kemari, tidak menentu mau kemana dan tidak dapat kembali mencapai daratan. Tetapi petani di Kabupaten Magelang cepat atau lambat akan dapat menjadi nakodanya, menjadi subyeknya pembangunan, akan menjadi lebih berdaya dalam mengelola usahataniya menjadi lebih menguntungkan, sehingga dapat meningkat pendapatan dan kesejahteraannya. Insy Allah. (Sb)

## BIPPK BOLAANG MANGONDOW

## Merajut Kembali Kegiatan yang Terserak

**D**i tengah *pluralisme persepsi mengenai kelembagaan penyuluhan pertanian di era otonomi, Kabupaten Bolaang Mangondow justru dengan percaya diri muncul sebagai Badan yang diberi nama Badan Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (BIPPK), yang bekerja keras menggali kembali nilai-nilai universal dari suatu penyelenggaraan penyuluhan pertanian.*

Apa yang terjadi bila kegiatan penyuluhan pertanian terserak di mana-mana tanpa berfokus pada aspirasi? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar sebuah visi

yang ditanamkan pada kelembagaan penyuluhan pertanian yang dibangun di Kabupaten Bolaang Mangondow. Keprihatinan terhadap kegiatan penyuluhan pertanian yang terserak di mana-mana, yang menyebabkan penyuluh pertanian seperti kebingungan dan terjebak pada pekerjaan rutin, sepotong sepotong bahkan kadang

sangat tergantung terhadap ada tidaknya proyek yang menaunginya! Sungguh adalah suatu kondisi yang tak bisa dibiarkan.

Seorang penyuluh pertanian, yang profesional harusnya bekerja dengan perencanaan yang bulat, yang didasarkan atas hasil identifikasi dan analisis terhadap aspirasi petani di wilayahnya. Tanpa dasar itu, maka segala program dan kegiatannya adalah sia-sia belaka, sama artinya dengan

orang berjalan tanpa tahu ke mana akan pergi. Seorang penyuluh sebelum memulai kegiatannya, seharusnya tahu tujuan apa yang akan dicapai! Dan mem-



*Institusi Penyuluhan semakin kuat dengan bentuk lembaga BIPPK*

bangun atmosfer penyuluhan pertanian seperti itu, memang memerlukan manajemen yang mempunyai *energi atau kekuatan* untuk menegakkan tujuan penyuluhan pertanian seperti yang dikehendaki. Dengan dasar visi itu BIPPK Bolaang Mangondow didirikan disertai sebuah PERDA Nomor 38 Tahun 2000.

Perjuangan mendirikanannya memang cukup panjang dan tidak serta merta seperti membalik telapak tangan, sehingga BIPPK ini bisa berdiri. Harus ada strategi untuk membangun kredibilitas kelembagaan ini agar mendapat kepercayaan orang, dan yang penting orang merasakan manfaat keberadaan kelembagaan ini. Tanpa strategi yang matang, mungkin kelembagaan ini tidak akan pernah dilirik orang. Melalui berbagai kegiatan yang cukup strategis di wilayah kabupaten, BIPPK ini beruntung mampu membangun citra dirinya khususnya dalam mengembangkan pemberdayaan petani. Di sisi lain di tahun 2001 juga mendapat penghargaan sebagai juara I dalam upaya Gerakan Disiplin Nasional antar instansi di Kabupaten Bolaang Mangondow.

Strategi lobi kepada legislatif dan eksekutif serta jabat tangan dengan mitra kerja di instansi lain agar jangan sampai ada tugas dan fungsi yang ganda, dibarengi dengan menjanjikan adanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kegiatan Penyuluhan Pertanian tertentu, adalah menjadi perjuangan dari kepemimpinan BIPPK. Yang kadang bekerja dari pagi ke pagi untuk memantapkan posisi kelembagaan dalam bentuk ini sehingga ada kesetaraan, keseimbangan dan harmonisasi dalam membangun satu kesatuan manajemen penyuluhan pertanian yang mempunyai visi ke depan.

Persoalan klasik yang selalu saja berdentung adalah bagaimana caranya agar petani dapat mengambil keputusan dalam usahatani secara mandiri? Bagaimana caranya petani bisa merespon terhadap dinamika perubahan permintaan pasar dan sekaligus mempunyai ambisi untuk

menolong dirinya sendiri tanpa menunggu intervensi dari luar? Bagi BIPPK persoalan seperti ini menjadi fokus yang tidak hentinya dicermati dan berupaya untuk mencari jalan keluar agar persoalan ini dapat segera dikerjakan, diperjuangkan sehingga dapat segera habis dituntaskan!

Beruntung BIPPK ini sejak dua tahun yang lalu, ada program *Delivery* yang setidaknya memberi *inspirasi* untuk memecahkan persoalan tersebut diatas! Dengan satu prinsip yang dipegang oleh BIPPK dan menjadi landasan sebuah misi yang ingin ditegakkan adalah bahwa segalanya harus dimulai dengan programnya petani. Tanpa dimulai dengan programnya petani, kita menganggap program itu hanya program ngawang-ngawang alias program yang tidak berjejak. Dan program *Delivery* ini seolah memberi jalan terhadap cita-cita seperti itu. BIPPK khususnya para Penyuluh Pertanian tertarik untuk bergabung dan bekerja sama.

Lewat sebuah pilot proyek, BIPPK mengawal program ini dan memang banyak kegiatan penyuluhan pertanian didefenisikan dan diimplementasikan. Dua orang tenaga Penyuluh pertanian secara *intens* mencermati dan mempelajari serta menerapkan langsung di lapangan. Banyak kebingungan yang dialami dalam menerima perubahan yang relatif baru ini, tetapi justru kebingungan ini ibarat sebuah transisi untuk meyakini terhadap perilaku-perilaku baru yang sebenarnya sangat diharapkan. Melalui proses dari pengalaman yang cukup panjang, akhirnya kami meyakini salah satu metode untuk lebih memahami dan menghargai aspirasi petani yang digali oleh mereka sendiri dengan metode yang disebut *Participatory Rapid Appraisal (PRA)*.

Metode ini meskipun bukan satu-satunya cara, tetapi minimal telah menjanjikan bahwa keterwakilan petani dalam menyalurkan aspirasinya tidak dirampas oleh orang lain yang yang tidak berhak. Petani ternyata mampu menggali, mengidentifikasi, menganalisis bahkan mampu merencanakan apa yang mereka mau!

Ke depan, sebenarnya hanya dua program utama yang dijagokan oleh BIPPK ini, yaitu (1) mewujudkan Penyuluh Pertanian Swakarsa dengan bingkai KTNA dan (2) membangun kelembagaan Penyuluhan Pertanian di tingkat Desa dengan sistematika yang utuh (bulat) dalam bentuk kelembagaan non orgfanik yang disebut Klinik Konsultasi Pelayanan Agribisnis (KKPA). Program Penyuluh Pertanian Swakarsa adalah program yang sangat penting, selain keinginan mengatasi kelesuan penyelenggaraan pertanian dewasa ini, adalah juga sebagai jawaban untuk menumbuhkan dan mengembangkan kepemimpinan KTNA sebagai unsur yang benar-benar tumbuh dan dipercaya dari kalangan mereka sendiri, dari sistem sosial yang ada pada mereka sendiri. Selama ini barangkali penyuluh-penyuluh yang ada kadang terasa sebagai *mahluk asing* yang mengintervensi sistem sosial di wilayahnya. Oleh sebab itu kita mengembangkan Penyuluh swakarsa ini dengan bingkai KTNA.

Untuk mewujudkan ini, BIPPK telah merintis dengan membekali KTNA dengan berbagai kegiatan. Diantaranya adalah bagaimana mengembangkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas KTNA sehingga memiliki kemampuan seorang penyuluh pertanian. Tahap pertama BIPPK

telah mengembangkan kurikulum pelatihan dan sekaligus mencoba menyelenggarakan dengan dukungan dana secara *cost sharing* antara proyek dan swadaya KTNA. Hasilnya dari perencanaan hanya 10 KTNA yang dilatih, telah mengembang menjadi 19 KTNA yang mengikuti, dan para KTNA ini telah mendapat semacam sertifikat dari kepala wilayah kabupaten dan dikukuhkan sebagai penyuluh pertanian swakarsa di wilayahnya.

Sebagai komunitas apapun namanya memerlukan wahana untuk menyalurkan aspirasi serta memperjuangkan apa yang mereka cita-citakan. Demikian pula KTNA mereka membutuhkan kemantapan akan kelembagaannya dan berbagai rancangan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan pengukuhan ini setidaknya selain telah menumbuhkan kebanggaan pada diri KTNA juga telah menciptakan wahana bagi mereka untuk memperjuangkan cita-citanya, sehingga secara moral mereka telah mendapat tanggung jawab lain, di luar kapasitasnya sebagai KTNA. Sampai saat ini respon mereka sungguh luar biasa, karena sejak saat itu mereka terlihat aktif dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan bulanan, khususnya bertempat di BIPPK ini. Jadi BIPPK ini adalah juga kantornya KTNA.

Tentang membangun KKPA, Program ini didasarkan pada pengalaman yang sering terjadi diantara petani. Acapkali petani setelah memahami sesuatu (inovasi baru) sering kebingungan karena sarana dan prasarananya tidak ada di tempat, sehingga apa yang mereka pahami tidak dapat mereka terapkan dengan segera. Kadang pula keinginan mereka untuk mengembangkan

usahatannya sering terkendala oleh harga yang tidak terjangkau. Mereka kadang membeli dengan mengabaikan prinsip efisiensi. Yang mereka butuhkan kadang hanya dalam jumlah yang kecil, padahal tidak ada kemasan sarana yang tersedia dalam jumlah yang kecil atau eceran. Pada kondisi demikian umumnya petani terpaksa membeli dalam jumlah besar (yang sebenarnya tidak terpakai semua), atau bahkan mereka memutuskan tidak membeli sama sekali.

KKPA dicita-citakan adalah kelembagaan yang dapat menjawab tantangan di atas. Karena itu KKPA diwujudkan ada di tingkat desa/petani, agar petani mudah menjangkaunya, selain itu KKPA didisain juga untuk memberikan pelayanan eceran sesuai dengan kebutuhan petani. Yang dilengkapi dengan pelayanan yang bulat, artinya KKPA tidak hanya memberikan jasa konsultasi semata yang hanya berupa informasi, tetapi KKPA menyediakan segala hal yang dibutuhkan petani dari mulai sarana pertanian (pupuk, alat pertanian), modal usaha, teknologi dan informasi yang terus menerus. Pada Benak BIPPK sistematika yang bulat seperti itulah, seharusnya pelayanan yang diberikan kepada petani, agar mereka secara cepat dapat mengambil keputusan dan merespon setiap perubahan yang terjadi.

Sekarang ini, mungkin sudah saatnya bagi BIPPK untuk menjanjikan PAD dari setiap kegiatan Penyuluhan Pertanian. Ini benar-benar kita tuangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mangondow Nomor 11 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Pelayanan Pertanian dan Kehutanan serta pungutan

dan Retribusi atasnya, yang isinya antara lain bahwa (1) setiap Jasa pelayanan dan penyuluhan kepada Kelompok tani dikenakan pungutan sebesar Rp. 2.500/ Kelompok). (2) Jasa Konsultasi dikenakan biaya 10% dari keseluruhan hasil dan (3) Penerapan metode Penyuluhan Pertanian, wajib mengembalikan sebesar 75% dari total biaya yang digunakan. Semua ini jangan dilihat nilainya. Yang sedang diyakini adalah bahwa kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian ini selain mempunyai efek dapat jangka panjang yang luar biasa, tetapi juga dalam jangka pendek mampu menghasilkan PAD secara nyata.

Di sisi lain bahwa dampak Peraturan Daerah ini, bagi penyuluhnya dituntut lebih profesional dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dulu memang terkesan bahwa penyuluhan pertanian dan tidak bisa segera (dalam jangka pendek) menunjukkan hasil fisik yang nyata. Kondisi ini sering kali membuat kegiatan penyuluhan pertanian tidak dilirik pemerintah daerah! Pada instansi-instansi lain di daerah seolah berlomba menjanjikan PAD yang cukup tinggi. Jadi ke depan program ini sangat layak untuk terus kita sosialisasikan, untuk menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan bukan kegiatan konsumtif belaka tetapi dia mempunyai efek ganda baik untuk jangka pendek dengan menghasilkan PAD bagi wilayahnya, tetapi juga memberi efek jangka panjang karena mampu membangun kualitas sumber daya manusia pada masa yang akan datang.

Sebagai konsekuensi logis dari misi yang diembannya, BIPPK harus mempunyai *cukup energi* untuk mengoptimalkan kinerja dari penyelenggaraan penyuluhan

pertanian yang menjadi tanggung jawabnya. Begitu pun penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya harus dilengkapi dengan senjata dan perbekalan yang memadai. BIPPK pada tahun 2001 ini ada sekitar 1 (satu) milyar rupiah dana yang didefinisikan untuk mendukung kegiatan penyuluhan ini. Dana ini sebagian besar adalah dana operasional untuk sekitar 250 tenaga penyuluh pertanian di lapangan. Umumnya dana bagi penyuluh pertanian adalah dalam bentuk perjalanan, rata-rata mereka mendapat sekitar Rp. 80.000 untuk tiap bulan.

Bagi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat Kecamatan, biaya yang hanya biaya administrasi, yang seharusnya dilengkapi dengan ketersediaan dana untuk pertemuan koordinasi dan kegiatan percontohan di lahan BPP. Dan untuk BIPPK sendiri idealnya selain dana administrasi, pertemuan rutin, monitoring dan evaluasi juga lebih difokuskan untuk mengembangkan strategi komunikasi untuk membangun citra pembangunan pertanian dan pelayanan informasi yang cepat dan akurat bagi petani untuk kegiatan pengembangan usahataniannya.

Ketika DAFEP muncul sebagai pilot Proyek, sungguh proyek ini menjadi napasny BIPPK ini, yang membawa nilai-

nilai baru dengan berbagai kegiatan yang ditawarkannya. Proyek ini tidak seperti proyek-proyek lain yang lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas kelembagaan, aparat dan petani yang ada di wilayah ini. Kembali BIPPK ini mendapat tantangan baru yang ditawarkan proyek ini untuk bersama-sama merancang berbagai kegiatan

dalam pengembangan sumberdaya manusia yang mempunyai kemandirian dan dapat mengambil keputusan secara cerdas dalam membangun usahataniannya yang berdaya saing.

Sangat disadari oleh BIPPK, bahwa kelembagaan ini tidak dapat hanya bekerja sendiri, sebab misinya memang harus berjabat tangan

dengan berbagai pihak untuk menciptakan ruang yang lebih terbuka dalam bekerja sama menumbuhkan jejaring kerja yang lebih luas untuk memberikan pelayanan yang lebih bulat sesuai dengan apa yang dibutuhkan petani dan masyarakat tani di pedesaan. Dengan harapan mampu melahirkan iklim yang lebih kondusif bagi pengembangan usaha disertai dengan berkembangnya sumberdaya manusia yang lebih berkualitas, yang lebih cerdas, yang mempunyai ambisi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan lebih maju (Aa).



*Ka. BIPPK Bolaang Mangondow*

## JENDER DALAM PENYULUHAN

Oleh : Hardono Tedjokoesoemo,  
Penyuluh Pertanian



**A**lkisah, sekelompok ahli kehutanan diundang ke suatu pertemuan di sebuah desa untuk bersama-sama masyarakat menyusun rencana pembangunan hutan kemasyarakatan. Para peserta pertemuan yang semuanya laki-laki menyatakan bahwa mereka ingin menanam spesies kayu keras agar kelak dapat dijadikan perabotan/mebel, dan patung untuk dijual. Maka, disediakanlah 3000 bibit sesuai dengan permintaan. Setelah beberapa lama, semuanya mati. Mengapa? Di desa itu, rupanya kaum perempuanlah yang biasa bertugas memelihara bibit tanaman; dan karena tak seorangpun diberitahu akan adanya bibit-bibit itu, maka bibit itu terlantar, dan akhirnya mati.

Pertemuan lain kemudian diadakan. Kali ini kaum perempuannya juga diundang.

Dan ahli kehutanan dalam pertemuan itu, kemudian menyadari bahwa kaum perempuan di desa itu ternyata lebih menyukai spesies kayu lunak yang cepat tumbuh untuk kayu bakar dan pakan ternak. Ketika proyek menyediakan kedua spesies sesuai dengan yang diinginkan baik oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuannya, maka kaum perempuan menanam dan memelihara kedua jenis bibit yang disediakan proyek. Dan kedua jenis spesies kayu itu tumbuh subur.

Pembaca, kisah di atas bukan karangan belaka, melainkan sebuah pertemuan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan



*Jender membuka wawasan tentang kesetaraan pria dan wanita*

Bangsa Bangsa (FAO) yang dimuat dalam penerbitan "How forestry can benefit from gender analysis" yang ditulis oleh Vicki L. Wilde dan Arja Vainio-Mattila (1995). Kisah itu menunjukkan bahwa informasi

yang lebih rinci dan terpilah menurut jender tampaknya sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Perencanaan pembangunan yang berpusat pada “rakyat” memerlukan informasi yang tepat tentang siapa “rakyat” itu. Mereka bukan kelompok yang homogen. Mereka terdiri atas perempuan dan laki-laki. Kaum “miskin” adalah perempuan miskin dan laki-laki miskin. Anak-anak, adalah anak perempuan, dan anak laki-laki. Dimanapun, dan dalam setiap kelompok sosial ekonomi, kehidupan perempuan dan laki-laki secara mendasar strukturnya berbeda. Permbagian tenaga kerja berdasarkan jender dapat dikatakan bersifat universal; akan tetapi berbeda menurut budaya, letak geografi, dan kelompok sosial-ekonomi.

Seperti kita ketahui, jender merupakan salah satu karakteristik sosial yang penting selain etnik, ras, umur, dan pekerjaan (karakteristik-karakteristik ini sendiri termasuk dalam lingkup analisis jender). Namun demikian, patut dicatat bahwa jender menyangkut keseluruhannya. Apapun etniknya, perempuan dan laki-laki memiliki peran, tanggung jawab, sumberdaya, kendala dan peluang yang berbeda, karena jender. Karenanya, informasi untuk perencanaan pembangunan belumlah akurat kecuali terpilah menurut jender. Sayangnya, informasi yang lengkap dan rinci tentang masyarakat masih sangat jarang. Oleh karena itu diperlukan teknik analisis jender (TAJ) untuk mengisi kesenjangan informasi tersebut.

Teknik analisis jender merupakan alat yang praktis untuk mengamati keragaman masyarakat dan implikasi keragaman itu bagi pembangunan, karena difokuskan pada

kegiatan dan sumberdaya yang dimiliki perempuan dan laki-laki, memperjelas dimana perbedaannya, dan dimana keduanya saling isi mengisi. Informasi itu dengan demikian digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan perencanaan seperti: Apakah tujuan pembangunan diarahkan pada kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki secara bersamaan? Atau pada kebutuhan dan prioritas yang berbeda? Siapa yang ingin berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan; perempuan, laki-laki, atau keduanya?

#### **PENGUNAAN TEKNIK ANALISIS JENDER UNTUK IDENTIFIKASI MASALAH PEMBANGUNAN**

Peralatan TAJ merupakan komponen yang penting bagi program dan proyek yang efektif. Dengan peralatan itu dapat diungkap bagaimana perbedaan jender menentukan hak, tanggung jawab, dan peluang rakyat dalam pengelolaan sumberdaya. Dengan mengetahui cara-cara perencanaan pembangunan mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda, maka perencanaan pembangunan dapat mengintegrasikan informasi yang diperoleh ke dalam pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi program dan proyek yang berhasil.

Teknik analisis jender yang disadur dari tulisan Barbara Thomas-Slyater, Andrea Lee Esser, dan M. Dale Shields (1993) yang bertajuk “*Tools of Gender Analysis: A Guide to Field Methods for Bringing Gender into Sustainable Resource Management*” ini, menawarkan beberapa cara pengumpulan

data dan analisis jender sebagai satu variabel dalam rumah tangga dan organisasi kemasyarakatan. Secara sendiri-sendiri, setiap metode memberikan pandangan baru tentang keadaan sebuah lokasi. Secara bersamaan, metode-metode ini memungkinkan kita untuk memahami situasi masyarakat secara lebih komprehensif, dan membantu kita dalam perumusan program pembangunan yang efektif. Metode-metode itu meliputi Pengurutan Kekayaan (*Wealth Ranking*); Wawancara Rumah Tangga Secara Mendalam (*In-depth Household Interviews*); Diskusi Kelompok Inti (*Focus Group Discussions*); dan Observasi Partisipatif (*Participant Observation*).

### Pengurutan Kekayaan

Metode ini merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh informasi dari informan kunci tentang perbedaan kondisi sosial ekonomi di suatu lokasi, dengan menggunakan kartu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel rumah tangga yang mewakili berbagai kelompok sosial ekonomi dalam masyarakat.

Dalam metode ini, kedua informan baik perempuan maupun laki-laki diwawancarai

secara terpisah. Jumlah informan cukup empat atau lima orang. Setiap informan diminta mengelompokkan kartu yang berisi nama keluarganya berdasarkan penilaiannya sendiri tentang kesejahteraan keluarganya. Setelah itu, petugas pengumpul data dan responden mendiskusikan karakteristik setiap tumpukan kartu yang disusun oleh informan yang bersangkutan, dan alasannya meletakkan kartunya pada tumpukan tertentu.

Metode ini menunjukkan bahwa indikator-indikator yang penting tentang strata sosial-ekonomi dalam masyarakat ditentukan oleh kedua belah pihak yaitu perempuan dan laki-laki, dan bukan oleh pengumpul data. Hasil analisa menunjukkan bahwa rumah tangga yang terpilih untuk Metode Wawancara Rumah Tangga Secara Mendalam ternyata dapat mewakili kisaran so-

sial-ekonomi masyarakat yang ada di lokasi yang bersangkutan.

### Wawancara Rumah Tangga Secara Mendalam

Teknik wawancara yang menggunakan metode

diskusi dengan perempuan dan/atau laki-laki dewasa yang mewakili rumah tangga yang bersangkutan ini, ditujukan untuk mengungkapkan peran jender dalam



*Untuk mengejar ketertinggalannya, perempuan terus belajar*



*Wawancara dengan anggota rumah tangga*

manajemen sumberdaya pada setiap rumah tangga, dan memberikan kesempatan kepada responden yang bersangkutan untuk mempelajari hubungan antara rumah tangganya dengan sistem sosial, ekonomi, dan ekologi tempat mereka tinggal. Dalam hal ini, pendapat kedua belah pihak baik perempuan maupun laki-laki perlu didengar, kendati biasanya lebih mudah memperoleh pendapat laki-laki daripada perempuan. Metode ini hendaknya dilakukan terhadap sekurang-kurangnya separuh dari jumlah responden yang terdiri dari perempuan, agar secara nyata dapat dilihat perbedaannya (disparitasnya).

Dalam metode ini, diskusi atau wawancara yang dilakukan sebaiknya informal dengan durasi selama seperempat sampai satu jam. Pewawancara dapat meliputi topik yang cukup luas disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat, misalnya: komposisi rumah tangga; status sosial-ekonomi; pembagian tenaga kerja dan pengambilan keputusan menurut jender; demikian pula penggunaan, akses, manajemen, dan kendali atas sumberdaya keluarga.

Pemilihan rumah tangga untuk metode

wawancara ini dapat dilakukan secara acak berdasarkan metode Pengurutan Kekayaan. Mereka dapat pula diidentifikasi oleh informan kunci, dan dipilih berdasarkan kriteria yang dibuat oleh pewawancara; atau dapat pula dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam pertemuan dengan masyarakat setempat. Melalui metode ini diharapkan kita dapat memahami secara mendalam rumah tangga yang bersangkutan, dan menggali lebih jauh beberapa

hal penting.

### **Diskusi Kelompok Inti**

Diskusi Kelompok Inti adalah pertemuan yang dihadiri kelompok kecil untuk mendiskusikan topik tertentu, dilakukan dalam suasana informal, dan peserta diskusi didorong untuk menyampaikan gagasan dan opininya. Melalui metode ini diharapkan kita dapat menggali peran jender dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan memahami keragaman persepsi dan opini tentang aspek-aspek tersebut. Metode ini dapat pula digunakan untuk menyusun sejarah perkembangan masyarakat yang bersangkutan, membuat diagram persepsi perempuan dan laki-laki tentang kelembagaan masyarakat, dan untuk membuat kecenderungan sumberdaya seperti curah hujan, produksi, penduduk, dan kesehatan.

Diskusi Kelompok Inti ini bermanfaat untuk menunjukkan prioritas kegiatan masyarakat berdasarkan jender; tingkat dan sifat kesadaran sumberdaya dari kedua pihak perempuan dan laki-laki; persepsi perempuan dan laki-laki tentang keefektifan kelembagaan.

### Observasi Partisipatif

Dalam metode ini, petugas pengumpul data mendampingi responden ketika yang bersangkutan menjalankan kegiatannya sehari-hari. Tujuannya adalah untuk mengamati dan mengumpulkan data tentang laki-laki, perempuan, dan anak-anak dalam kesehariannya. Dengan memperhatikan responden “pada saat dia bekerja”, diharapkan kita dapat memahami kendala dan peluang rumah tangga yang bersangkutan dalam pemanfaatan sumberdaya, dan memperoleh gambaran tentang hubungan antar keluarga.

Metode ini memungkinkan petugas pengumpul data atau peneliti untuk memperoleh pandangan tentang hal-hal yang mungkin muncul, tidak berdasarkan atas wawancara atau jadwal survey, melainkan karena keadaan yang khusus dari responden yang bersangkutan. Metode ini dapat mengungkap kegiatan-kegiatan yang mungkin tetap tersembunyi bila peneliti hanya berpegang pada survey.

### PENERAPAN TEKNIK ANALISIS JENDER DALAM PENYULUHAN

Metode tersebut di atas pada dasarnya dapat diterapkan dalam kegiatan penyuluhan baik penyuluhan pembangunan maupun penyuluhan pertanian dalam arti luas atau penyuluhan agribisnis sekalipun, karena penyuluhan merupakan salah satu subsistem dari sistem pembangunan. Hasil dari penerapan metode itu, tentunya



*Penerapan teknik analisis Jender dalam penyuluhan*

merupakan daftar permasalahan yang berbeda menurut perempuan, dan laki-laki. Dan tentu saja solusinya tidak sama untuk perempuan dan laki-laki. Kaum perempuan misalnya, membutuhkan cara-cara pengolahan daging menjadi abon melalui metode demonstrasi cara, sementara kaum laki-lakinya memerlukan pengetahuan pemasaran melalui metode *on the job training*.

Teknik analisis jender seperti diuraikan di atas, secara faktual telah dilaksanakan oleh Proyek DAFEP, melalui berbagai pelatihan baik di tingkat pusat maupun daerah. Penerapannya di lapangan diharapkan kini sedang berlangsung, dan keberhasilannya sangat tergantung pada kerjasama berbagai pihak terkait, mulai dari petaninya, penyuluhnya, sampai *District Extension Committee*-nya. Dan monitoring yang teratur serta evaluasi yang cermat kiranya akan sangat mendukung keberhasilan proyek DAFEP, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani-nelayan di daerah yang bersangkutan. Dan bila kelak diterapkan di daerah lain, diharapkan memberikan dampak yang kurang lebih sama.

# PRA

## Langkah Awal Membangun Pemberdayaan Masyarakat melalui Penyuluhan Partisipatif dalam DAFEP

oleh :

zahir zachri  
penyuluh pertanian



**P**RA (*Participatory Rural Appraisal*) atau sering diterjemahkan secara langsung sebagai *pengkajian / pengamatan perdesaan secara partisipatif*, adalah sebuah metode pembelajaran masyarakat. Metode ini bertujuan untuk *meningkatkan pengetahuan dan kemampuan analisis* masyarakat perdesaan dalam memahami kondisi (potensi dan masalah) kehidupan mereka dan desanya, agar mereka mampu menyusun rencana dan tindakan secara realistis dan rasional oleh mereka sendiri.

Banyak nama lain yang digunakan untuk kegiatan yang sama atau serupa dengan PRA, misalnya : PRRA (*Participatory Rapid Rural Appraisal* atau Pemahaman Perdesaan secara cepat dan partisipatif), P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa), PAP (*Participatory Assessment and Planning* atau Penjajagan dan Perencanaan (program) secara

partisipatif), PTD (*Participatory Technology Development* atau Pembangunan Teknologi secara partisipatif), FPR (*Farming Participatory Research* atau Kajian Pertanian secara partisipatif) dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sebelumnya, pernah dipopulerkan metode PRA (*Rapid Rural Appraisal*) sebagai metode pengamatan/pengkajian

..... di era reformasi ini, kata-kata Partisipatif dan Pemberdayaan Masyarakat telah menjadi kata-kata yang sangat populer dan menjadi jargon pembangunan. Hampir tak ada program atau proyek pembangunan yang tidak menggunakan kata-kata tersebut, sehingga penggunaannya terkesan sangat bombastis. Bila disimak lebih dalam, banyak program atau proyek yang tidak mencerminkan arti atau makna dan tujuan yang terkandung dalam kata-kata tersebut .....

perdesaan secara cepat, yang hasilnya diperlukan untuk menyusun program-program pembangunan yang berorientasi perdesaan. Dalam perkembangannya, metode RRA dinilai masih *bersifat top-*

*down*, karena proses penyusunan program masih dilakukan oleh *orang luar* dari desa tersebut. Selain itu, metode RRA-pun terkesan kurang aspiratif dan tidak partisipatif karena masih mendudukkan masyarakat pedesaan sebagai objek yang dikaji. Masyarakat desa hanya diperankan sebagai nara sumber saja dan tidak berperan

aktif dalam penyusunan program. Di kemudian hari, lahirlah metode PRA yang dikembangkan dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan dianggap lebih aspiratif.

Dalam perkembangannya, metode PRA ternyata menjadi lebih populer ketimbang RRA yang lahir lebih dulu. Mungkin karena metode PRA dinilai tepat dan lebih sesuai dengan tuntutan pembangunan yang semakin berorientasi pada peningkatan partisipasi masyarakat. Popularitas metode PRA ini dibuktikan dengan semakin berkembangnya metode yang sama dan atau yang serupa, dengan nama atau dengan istilah yang berbeda seperti telah diuraikan di atas.

Di satu sisi, perkembangan metode PRA ini sangat menggembirakan karena akan semakin memperkaya dan akan semakin meningkatkan efektifitas PRA sebagai sebuah metode pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Berkembangnya metode PRA membuktikan bahwa metode PRA merupakan sebuah proses dinamis yang senantiasa menerima perubahan-perubahan dalam penyempurnaannya. Selain itu, berkembangnya metode PRA dalam berbagai jenis, bentuk dan namanya, hal ini berarti pula akan semakin banyak program-program pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat perdesaan. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran akan terjadi suatu kondisi dimana masyarakat justru hanya dijadikan *objek pengkajian metodologi* (seperti metode PRA ini, atau metode-metode partisipatif lainnya), dan atau metode PRA ini dimanipulasi untuk memperoleh program atau proyek pembangunan semata.

Kekhawatiran ini muncul karena kata *partisipatif* yang disandang dalam metode ini. Kata *Partisipasi* atau *Partisipatif*, kini sudah menjadi *jargon* yang sangat populer, *nge-trend* dan *nge-top* dalam percaturan pembangunan di era reformasi dewasa ini. Banyak judul program dan proyek yang menyandang kata *partisipasi* dan atau *pemberdayaan masyarakat* namun bila dikaji lebih mendalam ternyata sama sekali tidak mencerminkan makna dan tujuan atau hasil yang ingin dicapai oleh kata-kata tersebut. Banyak judul program, proyek atau metode yang muncul karena didorong kelatahan semata tanpa memahami arti dan makna dari kata yang disandangnya.

Apakah penerapan metode PRA dalam DAFEP merupakan kelatahan atau karena ikut-ikutan semata? Jawabnya akan tercermin dari ketaat-azasan para pelakunya dalam menerapkan metode ini.

### PRA dalam DAFEP

Salah satu persyaratan yang harus dimiliki petani untuk memajukan usahataniya ialah harus memiliki kemampuan menyusun rencana usahatani efektif, efisien, realistik dan rasional. Kemampuan itu harus dimiliki dan tumbuh menjadi perilaku berencana para petani dalam menjalankan seluruh aspek kehidupannya. Kemampuan yang sama harus tumbuh pula menjadi perilaku kelembagaan petaninya, baik kelompoknya, gabungan kelompoknya atau asosiasinya. Kemampuan menyusun rencana yang efektif, efisien, realistik dan rasional, harus berangkat dari *kemampuan analisis* petani untuk dapat memahami kondisi (potensi dan masalah) kehidupan-

nya serta kondisi desa dan lingkungannya.

Dalam DAFEP, metode PRA dipilih sebagai kegiatan awal dalam upaya memberdayakan petani, karena diyakini bila metode ini diterapkan secara taat azas akan dapat menuntun proses pembelajaran petani untuk memiliki kemampuan di atas. Output atau hasil PRA dalam DAFEP ialah *Profil Usahatani Keluarga, Rencana Kegiatan Kelompok tani dan Rencana Kegiatan Masyarakat Desa*. Selain itu, hasil PRA inipun dirujuk untuk menyusun Rencana Kegiatan Penyuluhan & Pelatihan Petani di tingkat Desa yang disusun dan akan dilaksanakan oleh petani sendiri. Apakah para pelaku DAFEP sudah menerapkan metode PRA secara taat azas? Bagaimana memantau ketaat-azasan pelaksanaan setiap tahapan proses dalam penerapan PRA? Itulah masalahnya!

Dari pengamatan yang selama ini dilakukan, penerapan metode PRA di lokasi DAFEP sangat beragam kondisinya dan pada umumnya masih belum menunjukkan hasil sesuai yang diharapkan. Ada beberapa hal yang patut mendapat perhatian untuk upaya perbaikan di masa mendatang.

**Pertama**, pelaksanaan PRA cenderung hanya berorientasi untuk menghasilkan output kegiatan berupa dokumentasi instrumen hasil PRA semata, seperti *penelusuran sejarah desa, bagan kecenderungan dan perubahan desa, kalender musim, jadwal kegiatan sehari, peta desa, peta transek, diagram venn, bagan alir, mata pencaharian, matriks ranking dll*. Ya, karena hanya alat pembukti inilah yang selalu ditanya dan diperiksa pada saat ada pemantauan atau pemeriksaan proyek dari Pusat.

Satu hal yang umumnya dilupakan dalam pemantauan ialah bagaimana *proses* yang telah dilakukan untuk menghasilkan output tersebut. Secara metodologis, PRA menghendaki output tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran petani secara menyeluruh, artinya semua petani (tim PRA) terlibat secara aktif dalam memproses seluruh teknik PRA. Itulah makna *partisipatif* yang terkandung dalam PRA. Dalam prakteknya, petani dibagi menjadi beberapa kelompok kecil (2-3 orang) dan masing-masing kelompok memproses satu teknik PRA misalnya, peta transek, sementara kelompok-kelompok lainnya membuat instrumen yang lainnya. Dengan demikian, tidak semua petani mengalami pembelajaran seluruh teknik PRA secara utuh dan langsung. Hal ini mengakibatkan intensitas pembelajarannya jadi berkurang dan menjadi kurang efektif.

Alasan kenapa praktek pembelajaran dilaksanakan seperti ini, karena waktu yang tersedia dalam proyek DAFEP hanya tiga hari. Apabila semua petani peserta PRA harus melakukan seluruh instrumen teknik PRA secara bersama-sama, waktunya tidak akan cukup. Kemasan administrasi kegiatan dalam proyek dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Namun *Ruyat Wiratmadja*, salah seorang pakar penyuluhan yang juga tokoh utama perancang DAFEP mengatakan : "..... Para penyuluh masih terikat kuat sebagai pelaksana proyek. Sebenarnya proses pembelajaran petani tidak harus 3 hari berturut-turut selama 4-5 jam perhari, tetapi bisa dilakukan selama 10 hari dengan waktu belajar 1 jam perhari dan disesuaikan dengan waktu senggangnya petani,

berdasarkan kesepakatan mereka .....” Secara teoritis cara itu memang bisa dilakukan, tapi dalam prakteknya sangat sulit untuk melaksanakannya. Begitu komentar para pengelola proyek, terutama karena perubahan administrasinya tidak dapat diterima dan sering ditolak serta disalahkan oleh *para pemeriksa proyek*.

*Kedua*, kelemahan utama dalam memproses instrumen atau teknik PRA pada pembelajaran petani masih terjadi pada *tahapan proses analisisnya*. Pembelajaran PRA di tingkat petani saat ini tampaknya masih berada pada tahapan bagaimana cara mengumpulkan dan menampilkan data, tapi belum mencapai analisisnya. Proses pembelajaran PRA oleh petani baru mencapai tahapan belajar untuk menjawab *apa* yang terjadi pada kehidupan dan lingkungannya, tapi belum tajam *m e m p r o s e s* pertanyaan *mengapa* hal itu terjadi, *apa penyebabnya* dan *bagaimana kondisi yang sebaiknya harus diwujudkan, serta bagaimana cara untuk mewujudkannya*.

Kelemahan ini umumnya terjadi karena fasilitator dan atau Tim PRA terlalu asyik disibukkan untuk membuat dan menyajikan instrumen PRA selengkap dan sebaik mungkin, sehingga kehabisan waktu untuk memproses tahapan analisisnya secara lebih mendalam. Faktor lainnya, ialah karena para petani umumnya belum terbiasa melakukan analisis secara terbuka dan atau fasilitator

kurang mampu menggali pendapat peserta.

Kelemahan atau ketidak-tajaman dalam menganalisis data dapat menyebabkan perumusan masalahnya menjadi kurang akurat sehingga solusi dan perencanaan kegiatan yang dibuat oleh petanipun menjadi salah atau tidak tepat. Selain itu, tidak terprosesnya tahapan analisis secara mendalam dapat menyebabkan kurang dirasakannya manfaat dan kegunaan PRA bagi para petani, karena tidak menghasilkan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang sebenarnya.

“..... Pembelajaran adalah sebuah proses yang panjang dan terus-menerus atau proses yang berkelanjutan dan memerlukan

ulangan berkali-kali. Dalam pembelajaran PRA-pun kita tidak bisa berharap akan sempurna dalam sekali jalan, tetapi memerlukan ulangan. Menurut perkiraan, petani akan terampil melakukan PRA setelah melakukan 3-4 kali ulangan. Itu sebabnya dalam

DAFEP pelaksanaan PRA dilakukan setiap tahun, tidak hanya sekali untuk seumur hidup. Selain sebagai kegiatan belajar petani, juga dimaksudkan untuk memperoleh data mutakhir yang dibutuhkan petani untuk menyusun Rencana Usahatannya, Rencana Kegiatan Kelompok serta Rencana Kegiatan Desanya .....” demikian *Ruyat Wiratmadja menjelaskan lebih jauh*.

Semoga pernyataan ini tidak dianggap atau tidak digunakan sebagai *pernyataan*



*Ruyat Wiratmadja tokoh perancang DAFEP*

*maaf* atau *excuse* terhadap kekurangan-berhasilan proses pelatihan (TOM, TOT, dan TOF) serta terhadap *kekakuan* administrasi proyek yang kurang mendukung penerapan metode PRA secara taat azas dalam DAFEP.

### Ketaat-azasan Penerapan Metode PRA

Secara umum ketaat-azasan dalam menerapkan metode PRA akan dapat dilihat dari sejauhmana konsekuensi dan konsistensi para pelaku dalam menerapkan prinsip-prinsip PRA dan dalam memproses tahapan-tahapan kegiatan PRA pada pelaksanaannya. Apabila prinsip dan tahapan kegiatan PRA dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten atau dilakukan tanpa penyimpangan dengan dalih dan alasan apapun, itu berarti metode PRA telah dilaksanakan secara taat azas.

Prinsip adalah kaidah-kaidah atau nilai-nilai atau norma yang patut dianut dan harus diterapkan tanpa pengecualian apapun. Toleransi terhadap ketidak taat azasan atau tidak diterapkannya/ditinggalkannya prinsip tersebut, berarti telah menyimpang dari kaidah-kaidah yang seharusnya. Setiap penyimpangan mempunyai konsekuensi tidak tercapainya tujuan. Oleh karena itu, ketaat-azasan penerapan prinsip-prinsip PRA akan sangat menentukan terhadap keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

1. *Prinsip Mendahulukan Petani*; yakni keberpihakan kepada golongan masyarakat petani yang selama ini termarginalkan atau terpinggirkan. Seringkali bila ada kegiatan di desa, biasanya para *elite masyarakat desa*-lah

yang pertama-tama dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Alasannya merekalah yang mempunyai pengaruh dan lebih maju, sehingga akan memperlancar dan mempermudah dalam pelaksanaannya. Dalam metode PRA, justru harus lebih banyak melibatkan peran aktif masyarakat petani yang selama ini tersisihkan. Prinsip ini sesuai dengan prinsip yang dianut oleh DAFEP dengan motonya : *Farmers first*.

2. *Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*; PRA dimaksudkan untuk memberdayakan petani melalui proses pembelajaran agar berkemampuan untuk memiliki *akses* dan *kontrol* dalam pembangunan. Melalui pemberdayaan ini, petani diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk meraih peluang terhadap sumberdaya yang tersedia dan berkemampuan pula untuk berperan sebagai pengambil keputusan dan penentu dalam memilih dan memanfaatkan peluang tersebut.
3. *Prinsip Dari, Oleh dan Untuk Petani*; ialah petani bertindak sebagai subjek pelaku utama pelaksanaan PRA. Penyuluh berperan sebagai fasilitator bukan sebagai guru atau instruktur/pelatih bagi petani. Penerapan prinsip ini dalam prakteknya tidak mudah, karena baik petani maupun para penyuluhnya sendiri sudah terlalu lama dan sudah terbiasa mengikuti pola *linier*. Penyuluh terbiasa berperan sebagai *guru* atau *sumber pengetahuan* dan petani selalu diperankan sebagai *murid penerima* atau *pengguna pengetahuan*. Yang lebih ekstrim, penyuluh sebagai kepanjangan tangan birokrat seringkali berperan

sebagai pemberi perintah dan petani sebagai yang diperintah.

4. *Prinsip Belajar dan Menghargai Perbedaan*; ialah bahwa pelaksanaan PRA oleh para petani merupakan kegiatan belajar dalam kesetaraan. Karenanya dalam pelaksanaannya harus mampu mengembangkan iklim saling menghargai perbedaan pendapat di antara sesama peserta. Demikian pula halnya terhadap perbedaan adat istiadat, perbedaan tingkat kemajuan dan kemampuan penerapan teknologi, status sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain. Semua perbedaan itu harus didudukkan sebagai materi atau objek belajar yang akan dipelajari bersama sejalan dengan perjalanan waktu. Dalam prakteknya, menerapkan prinsip ini tidak mudah karena kita sudah terbiasa dengan pola keseragaman, dan kurang berpengalaman bekerja dalam iklim demokratis.
5. *Prinsip Triangulasi*; metode PRA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis masyarakat terhadap kondisi kehidupan dan lingkungannya. Kendatipun analisisnya bersifat kualitatif, namun akurasi data atau informasi yang dikumpulkan dan ketajaman analisisnya sangat diperlukan untuk dapat menghasilkan solusi yang benar-benar tepat. Karenanya, prinsip triangulasi ini perlu diterapkan secara taat azas. *Pertama*, adanya keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang anggota Tim PRA. *Kedua*, adanya keragaman sumber informasi artinya data, fakta, dan informasi, harus diperoleh dari berbagai sumber yang

berbeda. Ketiga, adanya keragaman teknik PRA yang digunakan, artinya selalu terbuka untuk menggunakan kombinasi teknik-teknik PRA agar dapat saling melengkapi. Penerapan prinsip ini memungkinkan untuk dilakukannya *check and re-check* baik terhadap data dan informasi yang dikumpulkan maupun terhadap teknik analisisnya. Menerapkan prinsip inipun tidak mudah, karena kita harus mengumpulkan orang-orang yang beragam dan atau mungkin harus memasukkan orang lain di luar petani, yang belum tentu siap atau bersedia untuk bekerjasama dan belajar bersama dalam kesetaraan.

6. *Prinsip Memecahkan Masalah Petani*; pelaksanaan PRA bukan hanya untuk memperoleh informasi semata, tetapi merupakan langkah awal untuk menemukan masalah yang dihadapi petani dan sekaligus mencari solusi pemecahannya. Pelaksanaan PRA merupakan hal yang sia-sia apabila tidak menghasilkan pemecahan masalah petani.
7. *Prinsip Belajar Dari Kesalahan*; sebagai proses belajar, kesalahan dalam melaksanakan PRA merupakan hal yang wajar, dan dari kesalahan itu kita bisa belajar untuk memperbaikinya serta tidak melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Kendatipun begitu, dalam pelaksanaannya sedapat mungkin tetap berusaha untuk menghindari kesalahan, dan sangat tidak dibenarkan untuk membuat kesalahan dengan sengaja.
8. *Prinsip Berkelanjutan*; PRA merupakan proses belajar yang terus-menerus atau

berkelanjutan. Pelaksanaan PRA bukan dimaksudkan untuk menghasilkan tampilan data dan informasi untuk kepentingan PRA itu sendiri, namun merupakan kegiatan awal untuk memproses kegiatan-kegiatan berikutnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya. Selain itu, pelaksanaan PRA itupun merupakan kegiatan yang harus diulang secara berkala agar senantiasa dapat mengikuti berbagai perubahan yang sangat dinamis.

9. *Prinsip Keterbukaan*; PRA menuntut terciptanya iklim keterbukaan dalam segala hal, baik yang menyangkut substansi atau materi, input, proses dan outputnya, maupun dalam manajemennya. Demikian pula halnya dengan metodologinya, metode PRA harus senantiasa

terbuka untuk menerima perubahan dan atau perbaikan metodologis.

10. *Prinsip Belajar Menemukan Sendiri (discovery Learning)*; metode PRA menuntut terciptanya iklim yang mampu mendorong tumbuhnya keinginan belajar dari para petani pesertanya. Fasilitator harus mampu menahan diri untuk tidak menjawab semua pertanyaan dan permasalahan yang ditemukan peserta, tetapi mengajak peserta untuk mampu menemukan jawaban dan solusinya oleh peserta sendiri secara benar.
11. *Prinsip Belajar Dalam Situasi Nyata*; seluruh kegiatan belajar dalam PRA harus dilakukan dalam situasi nyata bukan dilakukan melalui buku atau melalui kondisi yang artificial seperti simulasi, permainan, studi kasus dll.

#### Tahapan Kegiatan Pelaksanaan PRA - DAFEP :

1. Sosialisasi Pendahuluan di Desa (Informasi Perencanaan Kegiatan PRA di Desa)
2. Identifikasi / Inventarisasi Kelompok tani.
3. Pembentukan Tim PRA Desa.
4. Pengumpulan dan Pengkajian Data Sekunder.
5. Memilih dan Merancang Instrumen PRA (Berdasarkan Tujuan, Topik, Sub Topik).
6. Menyiapkan Pelaksanaan PRA di Desa. (Sosialisasi PRA kepada masyarakat Desa)
7. Melaksanakan kegiatan PRA di Desa.
8. Menganalisis Hasil Temuan PRA.
9. Menyiapkan Penyajian Hasil PRA.
10. Menyajikan Hasil Pra kepada Masyarakat-tani dalam Pertemuan Kelompok.
11. Menyusun Rencana Kegiatan Kelompok.
12. Merekap Rencana Kegiatan Kelompok.
13. Menyajikan Hasil PRA & Rekapitulasi Rencana Kegiatan Kelompok kepada Masyarakat dalam Pertemuan Pleno Desa.
14. Menyusun Rencana Kegiatan Desa.
15. Rencana Penyuluhan di desa
16. Membuat Laporan Lengkap Pelaksanaan Kegiatan PRA - DAFEP.

Sebagai contoh : dalam membuat peta transek, meski petani pada dasarnya setiap hari turun naik ke ladang atau ke sawahnya, tapi pada saat akan membuat peta transek, seluruh peserta seyogyanya menelusuri dan mengamati kembali lokasi tersebut secara bersama-sama dalam situasi nyata. Tidak menggambar-kannya melalui ingatannya semata.

12. *Prinsip Belajar Melalui Pengalaman*; seluruh anggota peserta Tim PRA seyogyanya mengalami secara langsung dan melaksanakan seluruh tahapan proses PRA secara bersama-sama, baik dalam memproses instrumen/ teknik PRA maupun dalam melaksanakan setiap tahapan kegiatan PRA.

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam ketaat-azasan pelaksanaan PRA ialah konsekuensi dan konsistensi dalam menerapkan metode secara utuh dan menyeluruh. *Metode* adalah serangkaian yang tersusun dalam tahapan-tahapan kegiatan yang sudah terukur, secara kumulatif akan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terlewatinya atau tidak dilakukannya salah satu tahapan kegiatan akan berpengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan. Karenanya dalam pelaksanaannya, diperlukan ketaat-azasan untuk melaksanakan setiap tahapan kegiatan secara utuh, menyeluruh, konsekuen dan konsisten.

Sebagai penutup, sajian tulisan ini dimaksudkan untuk menerapkan salah satu prinsip PRA yang sedang dirintis oleh DAFEP, yakni prinsip belajar dari kesalahan. Penerapan prinsip ini ialah dengan cara mencari dan menemukan kesalahannya agar dapat diperbaiki di masa mendatang dan menghindarkan terjadinya pengulangan kesalahan yang sama dua kali. Semoga ada manfaatnya. Kita sudah melangkah dan pantang untuk surut kembali. (Zz)



*Prinsip belajar melalui pengalaman*

# HASIL KEGIATAN MISI SUPERVISI III BANK DUNIA DI KABUPATEN-KABUPATEN LOKASI DAFEP

7 - 16 Agustus 2001

Decentralized Agricultural and Forestry Extension Project  
(IDA CREDIT 3280-IND AND LOAN 4510-IND)

Pada tahun 2001, Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan (DPPK/DAFEP) telah memasuki tahun kedua dan sudah merupakan kewajiban dari Bank Dunia untuk melakukan supervisi lagi dan kali ini adalah supervisi yang ketiga kalinya untuk memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian dan kehutanan di pusat maupun kabupaten-kabupaten lokasi DAFEP. Misi Supervisi III Bank Dunia terdiri dari Dely P. Gapasin (Bank Dunia Washington), Titie Hadiyati dan S. Soemardjo, (Bank Dunia Jakarta), serta Tito Conrado (Konsultan Penyuluhan). Misi Supervisi III dibagi dalam tiga kelompok yang mengunjungi ke tiga lokasi proyek yang berbeda bersama-sama dengan Tim supervisi dari Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan serta konsultan nasional yang terkait dengan DAFEP.



*Menyaksikan petani panen*

Mereka mengadakan monitoring dan evaluasi di kabupaten-kabupaten lokasi DAFEP di Propinsi Jawa Tengah (Kab. Magelang), D.I. Yogyakarta (Kab. Kulon Progo dan Bantul), Sumatra Utara (Kab. Simalungun dan Labuhan Batu), dan Nusa Tenggara Barat (Kab. Lombok Barat dan Bima). Sebelum melaksanakan supervisi ke daerah, misi mengadakan pertemuan dengan para pejabat pusat di Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan. Sedangkan dalam kunjungan supervisi di kabupaten, misi mengadakan pertemuan dengan para pejabat pemerintah, para

penyuluh pertanian dan kehutanan di kecamatan dan kabupaten, kelompok tani, dan instansi lain seperti; dinas-dinas lingkup pertanian dan kehutanan, balai penelitian, universitas, balai pelatihan, dan LSM yang

terlibat dalam pelaksanaan DAFEP. Dalam Misi ini juga bergabung Leena Kirjavainen



*Kunjungan di rumah petani*

dan Dorothy Hamada (Konsultan Jender) yang melaksanakan pilot studi tentang jender dalam DAFEP di Kabupaten Magelang, Kulon Progo dan Bantul.

**TUJUAN MISI**

Tujuan dari misi tersebut adalah: (a) menilai perkembangan kegiatan di kabupaten-kabupaten lokasi proyek dari bulan Januari sampai dengan Juni 2001/monitoring dan evaluasi partisipatif, (b) mendiskusikan berbagai masalah yang dihadapi oleh para pelaksana proyek, termasuk masalah perkembangan organisasi/institusi yang terkait dengan DAFEP, (c) merancang kembali DAFEP sehubungan dengan adanya perubahan yang terjadi karena

otonomi daerah/desentralisasi pemerintah. Sedangkan tim studi jender membahas pelaksanaan pilot studi tentang jender dalam manajemen sumberdaya keluarga/rumah tangga dan menyiapkan untuk pelaksanaan proyek jender Program for Household Resources Development peningkatan kemampuan untuk mengarusutamakan jender dalam penyuluhan, keduanya dibiayai oleh bantuan hibah yang disalurkan melalui Bank

Dunia.

**PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Sampai pada tahun kedua dari empat tahun jangka waktu proyek, untuk tahun anggaran 2001 sebagian besar kabupaten di lokasi DAFEP menerima dana proyek pada



*Proses money partisipatif*

bulan Mei/Juni, dan ini mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan kegiatan proyek. Ringkasan perkembangan kegiatan-kegiatan untuk tahun anggaran 2001 yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni 2001 adalah sebagai berikut :

- (a) Pelatihan PRA untuk master trainers dan training of trainers telah selesai dilaksanakan dan 90 orang telah dilatih termasuk penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan, staf LSM, ketua kelompok tani (termasuk wanita tani) dan beberapa pemuka masyarakat yang ada di 16 kabupaten lokasi DAFEP;
- (b) Dua pelatihan manajemen proyek bagi unit pelaksana proyek di daerah telah dilaksanakan untuk Kabupaten Mitra;
- (c) Beberapa kabupaten telah mulai melaksanakan pelatihan perencanaan partisipatif bagi ketua kelompok tani;
- (d) 19 orang konsultan nasional telah direkrut untuk bekerja di DAFEP, dan sembilan tenaga ahli pelatihan dan penyuluhan telah ditempatkan di sembilan propinsi untuk mendukung 16 kabupaten rintisan dan mitra;
- (e) Benchmark study telah selesai dilaksanakan di sepuluh kabupaten pada fase I dan hasilnya telah dipresentasikan dalam seminar pada tanggal 8 Agustus

2001 di Jakarta;

- (f) Para penyuluh pertanian dan penyuluh kehutanan serta koordinator BPP pada saat kunjungan misi sedang mengikuti pelatihan metode penyuluhan partisipatif;
- (g) 12 orang staf penyuluhan dari kabupaten DAFEP telah diseleksi untuk mengikuti program S2 di dalam negeri dan akan memulai belajar pada bulan September 2001 di empat universitas (USU, UGM, UNHAS dan IPB);
- (h) Juklak/juknis, manual, modul pelatihan dan materi pelatihan telah disiapkan untuk pelatihan PRA, pelatihan perencanaan partisipatif dan metode



*Pimpro DAFEP Pusat berinteraksi dengan petani sasaran*

penyuluhan partisipatif oleh kelompok kerja pelatihan DAFEP di pusat;

- (i) Pembangunan gedung BIPP untuk kabupaten mitra baru akan dilaksanakan oleh Kabupaten Bantul, sedangkan kabupaten lainnya dalam tahap persiapan pengajuan tender.

## KENDALA DALAM PELAKSANAAN PROYEK

Beberapa kendala utama yang ditemukan oleh Misi Supervisi III Bank Dunia saat kunjungan ke lapangan selama pelaksanaan kegiatan DAFEP berlangsung pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2001, antara lain adalah:

- (a) Keterlambatan dalam memulai kegiatan karena anggaran (DIP) baru turun pada bulan Mei/Juni,
- (b) Anggaran dalam DIP untuk beberapa kegiatan di tujuh kabupaten mitra masih bertanda "*bintang*",
- (c) Empat Kantor BIPP di kabupaten (Banyumas, Kotabaru, Tanah Laut dan TTS) telah dibubarkan oleh Pemerintah Daerah, sehingga reformasi penyuluhan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan konsep dan strategi DAFEP,
- (d) Beberapa staf pelaksana proyek di daerah belum memahami secara benar prosedur manajemen keuangan dan pengadaan barang dan jasa,
- (e) Pengarahan/pembinaan dari pusat masih lemah sehingga menghasilkan berbagai tafsiran dalam melaksanakan beberapa penyelenggaraan kegiatan,
- (f) Staf penyuluhan di daerah merasa tidak menentu posisinya sehubungan dengan reorganisasi kelembagaan yang masih berlangsung di kabupaten-kabupaten, dan
- (g) Sosialisasi lebih lanjut tentang konsep dan strategi pelaksanaan DAFEP masih sangat diperlukan bagi kabupaten-kabupaten yang lambat perkembangannya. (Hs)



*Pertemuan dengan Kelompok Tani*

# DAFEP DALAM GAMBAR

## DESENTRALISASI PENYULUH PERTANIAN DAN KEHUTANAN DI KAB. BOLAANG MANGONDOW



*Ir Djaunudin Mokoginta Kepala BIPPK (yang dulu BIPP) institusi penyuluhan menjadi kuat*



*Kab. Bolaang Mangondow salah satu Kab. yang telah menerapkan desentralisasi penyuluhan*



*Pertanian dan Kehutanan salah satu penyumbang pendapatan asli Kab. Bolaang Mangondow*



*Perpustakaan sumber informasi*



*Informasi praktis sangat dibutuhkan petani*

## KEGIATAN PENYULUHAN PARTISIPATIF



*Penyuluhan partisipatif diawali dengan pemahaman potensi desa melalui metoda PRA*



*Hasil pengamatan potensi desa berupa perencanaan kegiatan desa yang disampaikan dalam suatu pertemuan tingkat desa*



*Petani bersama-sama petugas melakukan monitoring dan evaluasi di tingkat desa*



*Petani berpartisipasi aktif dalam kegiatan penyuluhan*

**PETANI MASA DEPAN ADALAH PETANI YANG MAMPU MENGEMBANGKAN TEKNOLOGI LOKAL SPESIFIK**



*Peningkatan kemampuan dan keterampilan, membuat petani mau dan mampu menerapkan teknologi baru.*



*Teknologi lokal spesifik mampu meningkatkan hasil yang optimal*



*Petani sudah mampu melakukan uji coba di kebun sendiri*



*Dengan dibantu petugas, petani melakukan pengambilan sampel tanah untuk menentukan dosis pupuk yang tepat*

# Ekstensia *menerima :*

Tulisan yang bersifat aktual, tidak berkepanjangan, padat, mudah dibaca dan dimengerti, dengan gaya yang enak dibaca, jumlah 350 kata atau kelipatan bulatnya, diketik rapi, dan ditandatangani oleh penulis, dikirim ke Ekstensia dengan dilengkapi identitas/photo copy KTP / Karpeg penulis.

Untuk rubrik-rubrik :

## **OPINI**

Berupa tulisan pembaca yang merupakan tulisan asli, kondisi faktual di lapangan yang mengemukakan masalah, kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan pertanian khususnya penyuluhan pertanian, disertai dengan pemikiran tentang pemecahan masalahnya, (maksimum 350 kata).

## **WAHANA**

Tulisan dan gambar/fotonya, berupa feature/berita kisah dan profil dari suatu kelembagaan penyuluhan pertanian (BIPP, BPP, P4S, dll.), bertujuan untuk membangun motivasi berpartisipasi dalam pembangunan pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **SOSOK**

Tulisan dan gambar/fotonya, berupa feature dari sosok Penyuluh Pertanian untuk Kontaktani-Nelayan/petani maju yang melaporkan keberhasilan (success story), yang bertujuan untuk sebagai teladan bagi orang lain yang seprofesi.

## **WAWASAN**

Tulisan atau informasi bebas dengan gambaran/fotonya, berisi ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna, atau pengalaman lapangan dibidang pertanian, atau tulisan dari seorang ahli (peneliti, praktisi) dibidang pertanian, yang bertujuan untuk menambah wawasan.

## **RAGAM PERISTIWA :**

Tulisan dengan gambar/fotonya, berisi berita-berita penting, yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang berbagai peristiwa pembangunan pertanian dan penyuluhan pertanian, tentang apa, siapa, kapan, mengapa, dimana, dan bagaimana.

## **GEMA (PERHIPTANI)**

Tulisan dan atau berita/informasi bebas, dengan gambar/fotonya, berisi segala sesuatu berkaitan dengan organisasi Perhiptani dan atau organisasi profesi lainnya, yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi para pakar dan Penyuluh Pertanian dalam pengembangan organisasi dan profesinya, baik di pusat maupun cabang-cabangnya di daerah.

Ekstensia mempunyai wewenang yang mandiri untuk menentukan tulisan yang akan dimuat, sedangkan tulisan yang tidak dimuat akan dikembalikan apabila disertai dengan perangko yang cukup.

